



RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021

PADANG, JULI 2020



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Kerja Daerah untuk periode Tahun 2021.

Pasal 2

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renja Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 1. Biro Pemerintahan;
 2. Biro Humas;
 3. Biro Hukum;
 4. Biro Perekonomian;
 5. Biro Bina Bintel dan Kesra;
 6. Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
 7. Biro Organisasi;
 8. Biro Umum; dan
 9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RS Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;
 5. RSUD M. Natsir Solok;
 6. RSUD Pariaman;
 7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Pangan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 23. Dinas Kebudayaan;
 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 26. Dinas Pariwisata;
 27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 29. Dinas Kehutanan;
 30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Renja Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Penghubung; dan
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renja bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 54

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Renja Bappeda Tahun 2021 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada Tahun 2020. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita dalam melanjutkan pembangunan dan untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021.

Padang, Juli 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,



HANSASTRI, SE, Ak, MM, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	49
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021	55
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	56
3.3. Program dan Kegiatan	58
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2021	59
4.2 Pendanaan	62
V. PENUTUP	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan yang menjadi Kewenangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah tanggal 8 Februari 2020.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD dalam menampung program dan kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.

Proses penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan

fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

- 9) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 12) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
- 13) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 060-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- 14) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/36/VII/SET/Bappeda-2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja

Renja Bappeda adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk melaksanakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
- b. Sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda dan dengan Renja K/L

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2021

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2019 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 17.626.886.315,- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program dan 65 kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap adalah Rp. 16.973.987.941,- atau (96.3%) dengan realisasi fisik sebesar 98.69%.

Rincian persentase realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.063.798.308	6.030.647.374	99,45	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.420.000	39.420.000	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	879.600.000	873.910.749	99,35	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	842.347.000	834.188.630	99,03	100
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328.450.000	326.195.050	99,31	100
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	71.389.000	68.099.013	95,39	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.238.310	72.855.677	96,83	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000	88.338.828	98,15	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.490.276	42.990.849	96,63	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	44.702.100	40.729.050	91,11	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.585.161.622	3.583.271.528	99,95	100
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	16.000.000	13.750.000	85,94	100
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	47.000.000	46.898.000	99,78	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.036.182.933	1.984.802.303	97,48	100
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	26.750.000	25.978.500	97,12	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.409.000	283.903.500	94,51	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	131.465.000	126.562.303	96,27	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	47.200.000	45.650.00	96,72	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	72.344.900	69.093.000	95,51	100
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	258.014.033	256.615.000	99,46	100
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1.200.000.000	1.177.000.000	98,08	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	71.250.000	71.248.100	100	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	71.250.000	71.250.000	100	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	184.624.800	167.350.300	90,64	100
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	184.624.800	167.350.300	90,64	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	758.210.967	752.236.857	99,21	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	52.059.300	50.900.165	97,77	100
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	326.479.000	324.868.472	99,51	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	253.184.000	252.565.420	99,76	100
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	126.488.667	123.902.800	97,96	100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	435.920.000	422.508.855	96,92	100
1	Pengelolaan Website www.bappeda.sumbarprov.go.id	76.864.000	66.460.086	86,46	100
2	Pengelolaan data dan informasi spasial berbasis GIS untuk Perencanaan pembangunan	56.378.600	55.586.291	98,59	100
3	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	302.677.400	300.462.478	99,27	100
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.003.481.839	1.950.148.316	97,34	100
1	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	40.339.600	39.950.986	99,04	100
2	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	123.700.480	119.712.274	96,78	100
3	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	292.189.583	290.715.626	99,50	100
4	Revisi Perda RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2021	553.248.100	524.161.787	94,74	100
5	Penyusunan KUA/PPAS APBD	158.685.476	151.549.186	95,50	100
6	Penyusunan RKPD	218.287.080	210.814.517	96,58	100
7	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD	159.049.860	156.510.783	98,40	100
8	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi perencanaan Pembangunan Daerah	68.604.300	67.724.823	98,72	100
9	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	389.377.360	389.008.334	99,91	100
8	PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.073.417.468	5.595.045.836	92,12	97,07
1	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang	213.052.500	201.773.553	94,71	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
	Ekonomi				
2	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	153.006.400	145.272.491	95,60	100
3	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	236.029.500	235.282.708	99,68	100
4	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006	136.487.000	133.416.694	97,75	100
5	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	102.204.000	102.107.968	99,91	100
6	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	418.010.000	409.866.484	98,05	100
7	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	327.035.400	319.291.719	97,63	100
8	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat	429.816.000	394.511.922	91,79	100
9	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	45.470.100	44.583.187	98,05	100
10	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	108.229.100	103.053.530	95,22	100
11	Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	704.000.000	687.935.850	97,72	100
12	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	92.198.400	86.975.345	94,33	100
13	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	111.699.800	109.714.386	98,22	100
14	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	270.119.615	267.737.795	99,12	100
15	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	154.511.600	153.651.982	99,44	100
16	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	58.901.600	58.164.190	98,75	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
17	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	104.899.900	103.373.509	98,54	100
18	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah	64.788.100	64.206.613	99,10	100
19	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	159.477.600	154.836.576	97,09	100
20	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	74.283.396	69.990.390	94,22	100
21	Kerjasama Ekonomi Regional Dan Internasional	487.096.057	393.875.198	80,86	100
22	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	508.573.300	495.500.556	97,43	100
23	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	164.749.050	163.081.578	98,99	100
24	Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat	285.732.000	278.404.590	97,44	100
25	Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	76.001.000	72.326.624	95,17	100
26	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	146.907.700	145.830.268	99,27	100
27	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	110.000.000	107.365.549	97,61	100
28	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	53.376.350	51.917.481	97,27	100
29	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021	276.762.000	39.997.100	14,45	15
	TOTAL	17.626.886.315	16.973.987.941	96,30	98,69

Pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.063.798.308,- dengan indikator kinerja program adalah meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran.

Pelaksanaan fisik Program ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.030.647.347 atau mencapai 99,45%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 39.420.000,- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dilakukan antara lain untuk pendukung jasa administrasi (Honor PTT) dan pengiriman surat serta penyediaan benda pos. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.39.420.000,- atau 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman surat dan paket untuk kepentingan dinas serta pelaksanaan pembayaran honor PTT di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 879.600.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 873.910.749,- atau 99,35%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon, radio link, dedicated internet dan collocation.

3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Supir Kantor

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 842.347.000,-. Kegiatan ini ditujukan tersedianya jasa petugas dan peralatan kebersihan kantor, jasa sopir kantor serta jasa petugas dan peralatan pengamanan kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 834.188.630,- atau 99,03%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan, keindahan dan keamanan kantor.

4) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 328.450.000,-, kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 326.195.050,- atau 99,31%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan kantor pakai habis dan peralatan kantor.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah,

Dengan alokasi dana sebesar Rp.71.389.000,-. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan jaminan atas penggantian biaya kerusakan kendaraan dinas (asuransi kendaraan). Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 68.099.013,- atau 95,39%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jaminan perbaikan kendaraan operasional kantor.

6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.238.310,- Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya alat tulis kantor selama tahun 2019. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp.72.855.677,- atau 96,83%. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan ATK.

7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan kepentingan dinas. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.338.828,- atau 98,15%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi Bappeda.

8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 44.490.276,- kegiatan ini ditujukan agar tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 42.990.849,- atau 96,63% Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan penerangan pada bangunan/ruangan yang ada pada kantor Bappeda.

9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 44.702.100,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 40.729.050,- atau 91,11%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Bappeda dan umum.

10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.585.161.622,- Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.583.271.528,- atau 99,95%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

11) Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran jasa penceramah agama, instruktur senam, dan jasa publikasi. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 13.750.000,- atau 85,94%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pembinaan Rohani dan Jasmani staf Bappeda serta publikasi

12) Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 47.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya makan dan minum. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 46.898.000,- atau 99,78%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya operasional kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.036.182.933,- untuk mencapai indikator kinerja program adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.750.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan soundsystem, telepon dan fax, perbaikan jaringan instalasi telepon dan fax, kamera serta projector. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan

mencapai Rp. 10.560.000,- atau 75.11%. Hasil dari kegiatan ini adalah peralatan alat komunikasi dan studio dalam kondisi baik dan siap pakai.

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.409.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terpeliharanya gedung kantor Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 283.903.500,- atau 94,51%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 131.465.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 126.562.303,- atau 96,27%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 12 unit.

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 47.200.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan AC, Tabung kebakaran dan pompa air. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 45.650.000,- atau 96,72%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor.

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 72.344.900,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer dan suku cadang. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 69.093.000,- atau 95,51%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan komputer, laptop, printer layak pakai.

6) Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 258.014.033,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembuatan pagar antar gedung kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 256.615.000,- atau sebesar 99,46%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya gedung kantor yang layak pakai.

7) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional,

Dengan alokasidana sebesar Rp. 1.200.000.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya kendaraan dinas jabatan/operasional roda empat. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.177.000.000,- atau 98,08%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran operasional kantor dengan tersedianya kendaraan operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi dana sebesar Rp 71.250.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pengadaan pakaian dinas sipil harian PNS/Non PNS yang layak pakai bagi pegawai Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 71.250.000,- atau 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dalam berpakaian dinas.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu; Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 184.624.800,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya ASN yang mengikuti Bimtek. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 167.350.300,- atau 90,64%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas ADM.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 758.210.967,- dengan indikator kinerja program adalah meningkatnya tertib administrasi keuangan. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.059.300,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya buku kalender perencanaan, Renja dan DPA. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan

mencapai Rp. 50.900.165,- atau 97,77%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda.

2) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD,

Dengan alokasi dan sebesar Rp. 326.479.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran honor penatausahaan SKPD Bappeda. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 324.868.420,- atau 99,51%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pengelolaan administrasi keuangan OPD.

3) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 253.184.000,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (LAKIP, LPPD dan LKPJ Bappeda). Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 252.565.420,- atau 99,76%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPJ, LAKIP dan PK)

4) Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian aset SKPD

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.488.667,-. Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 123.902.800,- atau 97,96%. Hasil dari kegiatan ini adalah tertatanya administrasi Aset dengan baik.

6. Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan

Program ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 435.920.000,- dengan indikator kinerja program adalah dicapainya sasaran pembangunan sesuai target. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pengelolaan Website www.bappeda.sumbar-prov.go.id,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.864.000,- kegiatan ini bertujuan untuk terinformasikannya data dan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan sekretariat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya updating berita dan data pembangunan serta terlaksananya koordinasi pengelola website www.bappeda.sumbarprov.go.id. Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019, realisasi fisik

100% sedangkan keuangan sebesar Rp. 66.460.086,- atau 86,46%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemui masalah, namun rendahnya realisasi keuangan karena ada honor tenaga IT yang dialokasikan namun tidak bisa direalisasikan dan honor operator website yang membuat berita yang dibayarkan sesuai dengan ada atau tidaknya berita yang diserahkan kepada pengelola website.

2) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Spasial berbasis GIS untuk perencanaan Pembangunan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.378.600,- output kegiatan yaitu :

- a) Fasilitasi data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan
- b) Terlaksananya Koordinasi dan Rakor Data spasial
- c) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Tersedianya data dan informasi spasial untuk perencanaan
- b) Realisasi Fisik Kegiatan sampai akhir Desember 2019 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp 55.586.291,- atau 98,59% dengan sisa anggaran sebesar Rp 792.309,-

Permasalahan kegiatan yaitu belum optimalnya ketersediaan data dan informasi berbasis GIS dari stake holders. Tindak lanjut kegiatan adalah pada tahun 2020 kegiatan dilanjutkan dengan nama kegiatan yang sama, peran stakeholders lebih dioptimalkan dalam pengelolaan data dan informasi spasial untuk perencanaan

3) Kegiatan Koordinasi Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 302.677.400,- kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya Forum Data Perencanaan Pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan Tersedianya Forum Data Perencanaan Pembangunan lingkup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melakukan rapat Koordinasi tentang data dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b) Melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 98 Tahun 2019;

- c) Melakukan koordinasi dan konsolidasi ke pusat;
- d) Melakukan koordinasi dan fasilitasi ke kabupaten/kota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah : tersajinya data dan informasi ter update database, serta data informasi Pembangunan Sumatera Barat sebanyak 5 kali LPPD Tahun 2019 dengan target kinerja : tersajinya Forum Data dan Informasi, dan ter update database, serta data informasi pembangunan Sumatera Barat sebanyak 5 kali. Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 300.462.478,- atau sebesar 99,27%.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.003.481.839,- dengan indikator kinerja program adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dan persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS. Program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

1) Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership)

Dengan pagu dana sebesar Rp. 40.339.600,- keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Book). Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 39.950.986,- atau 99,04%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta oleh investor

2) Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana,

Dengan pagu dana sebesar Rp. 123.700.480,- keluaran dari kegiatan ini adalah persentase realisasi angka kredit fungsional perencana, terlaksanya rapat tim penilai angka kredit perencana, terlaksannya pertemuan berkala perencana sumatera barat, terlaksannya sosialisasi JFP dan presentasi makalah perencanaan pembangunan, terlaksananya pelatihan penulisan artikel dan karya ilmiah, terlaksananya seminar daerah perencanaan pembangunan, terlaksananya rapat kerja AP21 Sumbar. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 119.712.247,- atau 96,78% dengan hasil yang dicapai meningkatnya kualitas SDM Perencana Bappeda.

3) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 292.189.583,-. Keluarannya adalah terlaksananya Musrenbang RKPD tahun 2020. Dengan realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 290.715.626,- atau 99,50%. Hasil dari kegiatan adalah tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi program RKPD tahun 2020 antara stake holders dan kab/kota serta Pusat.

4) Revisi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2006-2021,

Dengan pagu dana sebesar Rp. 553.248.100,- keluaran dari kegiatan ini adalah Revisi Perda RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005-2025. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 524.161.787,- atau 94,74%. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan penyusunan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

5) Kegiatan Penyusunan KUA/PPAS APBD,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 158.685.476,- dengan keluaran tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2020. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 151.549.186,- atau 95,50%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2020

6) Kegiatan Penyusunan RKPD,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 218.287.080,- keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku RKPD Tahun 2020 dan RKPD Perubahan 2019. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 210.814.517,- atau 96,58%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya buku RKPD 2020 sebagai acuan dalam penyusunan KUA PPAS 2020 dan buku RKPD Perubahan 2019 sebagai acuan dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan 2019

7) Kegiatan Penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 159.049.860,- keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya buku KUA PPAS Perubahan Tahun 2019. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 156.510.783,- atau 98,40%. Hasil dari kegiatan ini adalah

tersedianya dokumen perencanaan dalam penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2019.

8) Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dengan alokasi sebesar Rp. 68.604.300,-. Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pengelolaan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sampai akhir Desember 2019 sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 67.724.823,- atau 98,72%. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Barat.

9) Kegiatan Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 389.377.360,- keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Realisasi fisik sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 389.008.334,- atau 99,91%. Hasil dari kegiatan ini adanya implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah oleh OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

8. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.811.321.675,- indikator kinerja program adalah persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi,

Dengan alokasi dana sebesar Rp 213.052.500,-. output kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta kerjasama dengan rumusan program perencanaan pembangunan lingkup bidang ekonomi yang bersifat sinergis antar berbagai instansi antara pusat dan daerah, dan adanya laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi daerah berikutnya.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Terjadinya peningkatan efektifitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dengan adanya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan dari berbagai sektor lingkup bidang ekonomi dan pada sektor lainnya yang menunjang pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
- b) Tersedianya data dan informasi tentang rencana pembangunan Bidang Ekonomi.
- c) Realisasi Fisik Kegiatan sampai akhir Desember 2019 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp201.773.553,-atau94,71% dengan sisa anggaran sebesar Rp 11.278.947,-

2) Harmonisasi program/kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.006.400,- kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program P2KP di Sumatera Barat. Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan Anggota Tim Koordinasi Provinsi, Satkerdan Konsultan Managemen Wilayah (KMW)
- b) Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c) Monitoring dan evaluasi ke lokasi Program P2KP pada 11 Kabupaten/Kota

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan hasil yang diharapkan terwujudnya sinergitas pelaksanaanprogram penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.272.491,- atau sebesar 95,60%.

3) Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Dengan alokasi dana sebesar Rp 236.029.500,- kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinir, terintegrasi, sinkronisasi dan sinergisitas dokumen perencanaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a) Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja OPD Provinsi;
- b) Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten/Kota;

- c) Melakukan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota (RPJPD dan RPJMD).
- d) Koordinasi dan konsolidasi ke Pusat tentang evaluasi dokume
- e) perencanaan Kabupaten/Kota

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja OPD Provinsi sebanyak 4 kali;
- b) Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten/Kota sebanyak 4 kali
- c) Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Perencanaa Kabupaten/Kota (RPJPD dan RPJMD) sebanyak 5 kab/kota.
- d) Koordinasi dan konsolidasi ke Pusat tentang evaluasi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota;
- e) Verifikasi Renja T2 OPD Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 235.282.708,- atau sebesar 99,68%.

4) Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manajerial Aplikasi PP 39/2006,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.487.000,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi/sinkronisasi dan sinergisitas pemantauan dan pelaporan manajerial aplikasi PP 39/2006 terhadap pelaksanaan dan dekosentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) di Sumatera Barat.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi Pelaporan ManajerialTriwulanan dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkupProvinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota;
- b) Melakukan rapat pemantauan, monitoring dan evaluasi Lapora Manajerial Triwulanan sesuai Aplikasi PP 39/2006 di Kementerian PPN/Bappenas;
- c) Melakukan Pemantauan lapangan pelaksanaan dana APBNkegiatan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan keKabupaten/Kota;
- d) Melakukan koordinasi dan konsolidasi laporan manajerial PP39/2006 ke Pusat/Luar provinsi.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Pemantauan dan Evaluasi Laporan Manajerial Konsolidasi Triwulanan Program kegiatan pembangunan Dana APBN/DIPA Tahun

Anggaran 2017 melalui Aplikasi PP 39/2006 (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV) sebanyak 4 kali. Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 133.416.694,- atau sebesar 97,75%.

5) Kegiatan Akselerasi Capaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur,

Dengan pagu dana sebesar Rp.102.204.000,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Terlaksananya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam program dan kegiatan pada lingkup perencanaan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- b) Terlaksananya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah Provinsi pada Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kabupaten/kota dan Pemerintah pusat.
- b) Pengumpulan data dan informasi ke Kabupaten/kota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi serta pengumpulan data data dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur dan tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Tahun 2019.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran pembangunan pada Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- b) Meningkatnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, akuntabel dan transparan

Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.102.107.968,- atau sebesar 99,91%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah : Belum sepenuhnya SKPD Lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempedomani pencapaian

sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada Misi II yakni Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional dengan beberapa sasaran strategis yakni : 1) Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur; 2) Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur; 3) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 4) Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan; dan 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Solusi antara lain :

- a) Perlu koordinasi yang intens dengan SKPD Lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada Misi II.
- b) Perlu adanya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Dengan pagu dana sebesar sebesar Rp.418.010.000,-. output kegiatan yaitu : terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai regulasi yang berlaku, tersedianya data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dan terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan antar OPD dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan sesuai mekanisme perencanaan yang ditetapkan
- b) Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait isu strategis lingkup infrastruktur dan kewilayahan
- c) Tersedianya data dan informasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan

- d) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan sektor infrastruktur dan kewilayahan dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor infrastruktur dan kewilayahan
- Realisasi Fisik Kegiatan sampai 31 Desember 2019 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp 409.866.484,- atau 98,05.

Permasalahan kegiatan yaitu tidak ditemui permasalahan mendasar selama pelaksanaan kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan mencapai 100%.

7) Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 327.035.400,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat serta Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melakukan rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (APBD, DAK dan APBN);
- b) Melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan ke Kabupaten/Kota;
- c) Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi dengan Pusat.
- d) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- e) Melaksanakan fasilitasi RKPD Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 Kabupaten/Kota;

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Terlaksananya Rapat Pengendalian capaian kinerja program/ kegiatan APBD Provinsi Sumatera Barat (T1, T2, T3, T4) sebanyak 4 kali;
- b) Rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 75 kali;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d) Monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota sebanyak 19 kab/kota;
- e) Koordinasi pengendalian dan evaluasi ke pusat;
- f) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Target Kinerja :

- a) Terlaksananya Rapat Pengendalian capaian kinerja program/ kegiatan APBD Provinsi Sumatera Barat (T1, T2, T3, T4) sebanyak 4 kali.
- b) Terlaksananya rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 75 kali;
- c) Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d) Terlaksananya Monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota sebanyak kab/kota;
- e) Terlaksananya Koordinasi pengendalian dan evaluasi ke pusat;
- f) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Realisasi Target dan Anggaran: Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 319.291.719,- atau sebesar 97,63%.

8) Kegiatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat,

Dengan pagu dana sebesar Rp.429.816.000,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatnya kelembagaan PUG Provinsi Sumatera Barat dan pada Pemerintah daerah Kabupaten/kota
- b) Terfasilitasinya penyusunan PPRG SKPD Provinsi Tahun 2020
- c) Tersosialisasinya dengan baik Pengarusutamaan Gender pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama pelaksanaan PPRG
- d) Ditetapkannya RANDA PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota
- e) Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan RANDA PUG Bagi Pemerintah Kabupaten / Kota

Jenis Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang kelembagaan PUG
- b) Pelaksanaan review/verifikasi PPRG pada usulan OPD Tahun 2020
- c) Monev Pelaksanaan PUG dan PPRG di Kabupaten/Kota
- d) Penyusunan dan penetapan RANDA PUG bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota
- e) Pelaksanaan dan Pemantauan RANDA PUG

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat
- b) Terverifikasinya Dokumen GAP dan GBS SKPD Tahun 2020

c) Verifikasi Laporan RANDA PUG Kabupaten/Kota

d) Pembinaan dan Pemantauan RANDA PUG Kabupaten/Kota

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya capaian IPG dan IDG. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.391.391.922,- atau 91,06%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

a) Masih minimnya pemahaman SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan konsep PUG dan pelaksanaan PPRG

b) PUG baru dipahami sebatas pemisahan antara laki-laki dan perempuan

c) PUG belum menjadi prioritas konsep pembangunan

d) Masih lemahnya peran SKPD Pemberdayaan Perempuan ditingkat Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah

e) Belum optimalnya peran Tim Penggerak PPRG dalam melaksanakan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

f) Pelaksanaan RANDA PUG baru sebatas output belum kepada outcome

Solusi antara lain :

a) Meningkatkan koordinasi PUG di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

b) Sosialisasi konsep PUG pada setiap proses perencanaan dan penganggaran

c) Peningkatan kapasitas anggota Tim Penggerak PPRG dan Focal Point di masing-masing SKPD

d) Pemanfaatan Sistem Pemantauan Kantor Staf Presiden dalam pemantauan PUG di Kabupaten/Kota

e) Pembinaan secara intensif kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PUG

9) Kegiatan Harmonisasi Progres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.470.100,- keluaran dari Kegiatan ini adalah : Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi RAD SDGs di Sumatera Barat. Hasil dari kegiatan ini adalah Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs di Sumatera Barat. Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.583.187,- atau 91.04%

10) Kegiatan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia,

Dengan pagu dana sebesar Rp.108.229.100,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam program kegiatan pada lingkup perencanaan sub bidang sumber daya manusia.
- b) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam program kegiatan pada lingkup perencanaan sub bidang sumber daya manusia melalui keterpaduan dari berbagai SKPD dan lintas sektor serta Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsinya dan kewenangan masing-masing.
- c) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat

Jenis Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah Provinsi Lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia

- a) Penyusunan Aplikasi Swastisaba
- b) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
- c) Pelatihan Kabupaten/Kota Sehat
- d) Mengikuti rapat-rapat koordinasi di Pusat dan Kabupaten/Kota terkait dengan perencanaan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Percepatan sasaran pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia, dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pengumpulan dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan sub bidang sumber daya manusia.
- b) Tersusunnya Laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan rapat-rapat, dan hasil pertemuan (Notulen dan laporan perjalanan dinas) dari Kegiatan Akselerasi Pencapaian sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2019.
- c) Tersusunnya Aplikasi Swastisaba dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat.
- d) Terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia. Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.103.053.530,- atau sebesar 95,22%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Isu pada Sub Bidang Sumber Daya Manusia bersifat lintas sektor sehingga masih terdapat beberapa kesulitan dalam melaksanakan koordinasi
- b) Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat selama ini masih berorientasi pada output yakni baru sebatas mendapatkan penghargaan Swastisaba sehingga outcome kegiatan masih belum terlalu nampak

Solusi antara lain :

- a) Pemanfaatan secara maksimal aplikasi swastisaba dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- b) Koordinasi yang intens dengan para SKPD pemangku kepentingan melalui rapat-rapat koordinasi
- c) Pembinaan ke Kabupaten/Kota secara kontinue dan intensif baik dalam bentuk rapat/pertemuan maupun pemantauan langsung kelapangan.

11) Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia sebesar Rp.704.000.000,- dengan output kegiatan : Terlaksananya Perencanaan dan implementasi program IPDMIP. Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Meningkatnya pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan pada Program IPDMIP
- b) Realisasi Fisik Kegiatan sampai dengan Desember 2019 adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp687.395.850 atau 97,64% dengan sisa anggaran sebesar Rp 16.604.150,-

12) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia, dengan pagu awal dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp.92.198.400,- dengan output terlaksananya perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan

pelaksanaan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Provinsi Sumatera Barat. Realisasi fisik Kegiatan sampai keadaan 31 Desember 2019 adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp. 86.975.345,- atau 94,33%

13) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia, dengan pagu awal dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp.111.699.800,- dengan output kegiatan :

- a) Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi percepatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian dan perikanan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan Sinergitas Program sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan dan komoditi unggulan
- b) Tersedianya data dan informasi tentang percepatan pembangunan sektor Pertanian dan Perikanan.

Realisasi Fisik Kegiatan sampai keadaan 20 Desember 2019 adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp109.339.386 atau 97,89 % .

14) Kegiatan Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.119.615,- tujuan dari kegiatan ini adalah sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah tahun 2019; dan Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing bidang urusan pemerintahan tahun 2019.

Pelaksanaan Kegiatan, dalam bentuk:

- a) Rapat persiapan Rakortek Pemerintah Provinsi dengan SKPD dan Kabupaten/Kota;
- b) Rapat koordinasi teknis antara Pemerintah Pusat/ Kementerian dan Lembaga dengan Pemerintah Daerah untuk pembahasan usulan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- c) Rapat Koordinasi Teknis Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian hasil Rakortek Pusat kepada seluruh SKPD dan Kab/Kota.

Keluaran kegiatan antara lain

- a) Terlaksananya rapat teknis persiapan Rakortek.
- b) Terlaksananya Rakortek Tingkat Provinsi.
- c) Terlaksananya Rakortek Tingkat Pusat.

Hasil yang diharapkan adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan daerah tahun 2020.

Realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 267.737.795,- atau 99,12%.

15) Kegiatan Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL),

Dengan pagu dana sebesar Rp.154.511.600,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatnya kapasitas Anggota Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b) Meningkatnya koordinasi antara Pokja AMPL Nasional, Pokja AMPL Provinsi dan Pokja AMPL Kabupaten/Kota
- c) Terfasilitasinya pelaksanaan Program AMPL di Provinsi Sumatera Barat
- d) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Replikasi Manajemen Pengelolaan Data AMPL bagi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Pasaman, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kota Solok, Bukittinggi dan Pariaman
- e) Terlaksananya advokasi Replikasi Manajemen Pengelolaan Data AMPL bagi Kabupaten/Kota lainnya
- f) Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan perencanaan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas III) pada 12 Kabupaten di Sumatera Barat

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) TOT pelaksanaan SABRT bagi Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan SABRT dan juga yang telah melaksanakan SABRT
- b) Monitoring dan evaluasi kelembagaan Pokja AMPL dan program/kegiatan pembangunan AMPL di Kabupaten/Kota
- c) Fasilitasi dan pendampingan serta pemantauan Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Data AMPL pada Kabupaten/Kota peserta
- d) Fasilitasi pelaksanaan program AMPL di Sumatera Barat

- e) Rapat Tim Koordinasi Provinsi Program Pamsimas antara anggota Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Konsultan, Satker dan Kabupaten pelaksana Program Pamsimas III
- f) Pemantauan pelaksanaan Program Pamsimas III pada 12 kabupaten di Sumatera Barat
- g) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Program Pamsimas III pada 12 Kabupaten dan Persiapan Program Pamsimas III Tahun 2018 pada 12 Kabupaten

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan data di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dan advokasi kepada Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat
- b) Meningkatnya kapasitas Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c) Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan Program Pamsimas III pada 12 kabupaten di Sumatera Barat
- d) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan pelaksanaan program PAMSIMAS III di Provinsi Sumatera Barat

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a) Makin berfungsinya kelembagaan Pokja AMPL di Kabupaten/Kota serta terfasilitasinya Program AMPL di Sumatera Barat khususnya pelaksanaan manajemen pengelolaan data AMPL dan Program Pamsimas III pada 12 Kabupaten
- b) Makin berfungsinya peran Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS III pada 12 Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
- c) Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.153.651.982,- atau 99,44%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Kegiatan ini merupakan kegiatan yang saling terkait antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b) Pelaksanaan kegiatan dari Pusat terlambat dimulai yakni pada bulan Oktober 2019 sehingga menyebabkan seluruh proses dalam pelaksanaan SABRT tidak berjalan maksimal

- c) Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan program PAMSIMAS.

Solusi antara lain :

- a) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Membangun komitmen semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SABRT sehingga kendala dan permasalahan kedepan dapat dieliminasi
- c) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan PAMSIMAS

16) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia, dengan pagu awal dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp.58.901.600,- dengan output kegiatan terlaksana dukungan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Komisi Irigasi, Dewan Sumber Daya Air, TKPSDA, dll) dan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP). Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan PerkuatanKelembagaan Sumber Daya Air. Realisasi Fisik Kegiatan sampai dengan Desember 2019 adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp58.164.190atau98,75%.

17) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia sebesar Rp.104.899.900,- dengan output kegiatan yaitu :

- a) Tercapainya percepatan pembangunan sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha di Sumatera Barat
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi daerah berikutnya.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan : Terjadinya peningkatan percepatan pembangunan sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha di Sumatera Barat dan Tersedianya data dan informasi tentang rpercepatan pembangunan sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha.

Realisasi fisik kegiatan adalah 100 % dan realisasi keuangan mencapai Rp. 103.373.509,-atau 98,54 % .

18) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.788.100,- keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota. Hasil dari kegiatan ini adalah Sinergitas dan integrasi pelaksanaan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.206.613 atau 99,10%.

19) Kegiatan Harminisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.477.600,- tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Mengevaluasi perkembangan program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang sudah diakomodir pada APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Sinkronisasi Program / Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c) Membahas usulan, permasalahan dan solusi.

Pelaksanaan Kegiatan, dalam bentuk:

- a) Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Melaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se Sumatera Barat.

Keluaran Kegiatan : Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan dengan hasil :

- a) Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pendanaan program dan kegiatan;
- b) Terlaksananya rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikot se Sumatera Barat.

Realisasi : Realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.836.576,- atau 97,09%

20) Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.283.396,- keluaran dari kegiatan adalah tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan PDT. Realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% dan realisasikeuangan Rp. 69.990.390,- atau 94.22%. Hasil pelaksanaan adalah terlaksananya koordinasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal.

21) Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 487.096.057,- dengan keluaran tersedianya laporan kerjasama ekonomi regional dan internasional. Realisasi Fisik dari pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dan Realisasi Keuangan Rp. 393.875.198,-

atau 80,86%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinergitas program bidang ekonomi.

Permasalahan : Beberapa rencana kegiatan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kerjasama pembangunan regional dan internasional tidak direalisasikan karena tidak diperolehnya rekomendasi izin dari Kemendagri.

22) Kegiatan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Dengan pagu dana sebesar Rp.508.573.300,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan antara Pemerintah Pusat, SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- b) Terlaksananya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan perencanaan program kegiatan pembangunan melalui keterpaduan lintas sector lingkup bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah Provinsi Lingkup Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kabupaten/Kota dan menghadiri undangan rapat dari Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga).
- b) Verifikasi/Pembahasan Renja SKPD, Musrenbang dan KUA PPAS.
- c) Mengikuti agenda pembahasan pembahasan penyusunan perencanaan dan penganggaran baik ditingkat Pusat dan Provinsi.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi.
- b) Tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- c) Terlaksananya pembahasan/verifikasi Renja SKPD, Musrenbang dan KUA PPAS.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a) Terfasilitasinya permasalahan perencanaan di lingkup Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan baik lintas program, lintas SKPD Provinsi maupun kabupaten/kota.

- b) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan bidang sosial budaya dan pemerintahan melalui rapat-rapat koordinasi lintas SKPD dan lintas sector, serta pertemuan-pertemuan ditingkat Provinsi, Kabupaten Kota dan Pusat.
- c) Terwujudnya Dokumen hasil pembahasan lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang saling bersinergi lintas sector dan program, dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial serta Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.495.500.556,- atau sebesar 97,43%.

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Penyusunan perencanaan belum sepenuhnya mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b) Masih minimnya pemahaman SKPD dalam penyusunan perencanaan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan
- c) Masih adanya ego sektoral dalam penyusunan perencanaan.
- d) Perencanaan belum sepenuhnya disusun berdasarkan prioritas, serta saling bersinergi antara SKPD yang satu dengan yang lainnya.

Solusi antara lain :

- a) Perlu adanya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah
- b) Penyusunan Prioritas pada masing-masing SKPD perlu mempertimbangkan hasil cascading yang telah disusun

23) Kegiatan Akselerasi dan Harmonisasi Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Input dari kegiatan yaitu dana yang tersedia Rp164.749.050,- dengan output kegiatan yaitu :

- a) Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang sinkron
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya

Hasil dari pelaksanaan kegiatan :

- a) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan SDA, Tata Ruang dan lingkungan hidup dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pembangunan SDA, Tata Ruang dan lingkungan hidup.
- b) Realisasi Fisik Kegiatan sampai akhir Desember 2019 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp 163.081.578, -atau 98,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.667.472,-

Permasalahan kegiatan yaitu belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup.

Tindak lanjut kegiatan yaitu:

- a) Tahun 2020 kegiatan dilanjutkan dengan nama kegiatan yang sama
- b) Peran stake holders akan lebih dioptimalkan dalam koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup

24) Kegiatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat,

Dengan pagu dana sebesar Rp.285.732.000,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat
- b) Meningkatnya peran serta (pemberdayaan) masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Pengembangan Aplikasi Swastisaba
- b) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
- c) Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat
- d) Fasilitasi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Pengembangan Aplikasi Swastisaba dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat.
- b) Terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.278.404.590,- atau sebesar 97,44%

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat selama ini masih berorientasi pada output yakni baru sebatas mendapatkan penghargaan Swastisaba sehingga outcome kegiatan masih belum terlalu nampak
- b) Masih rendahnya komitmen Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan Aplikasi Swastisaba
- c) Belum sinerginya antara Forum Kabupaten/Kota Sehat dengan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat
- d) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Kabupaten Kota Sehat

Solusi antara lain :

- a) Pemanfaatan secara maksimal aplikasi swastisaba dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- b) Koordinasi yang intens dengan para SKPD pemangku kepentingan melalui rapat-rapat koordinasi
- c) Pembinaan ke Kabupaten/Kota secara continue dan intensif baik dalam bentuk rapat/pertemuan maupun pemantauan langsung kelapangan.

25) Kegiatan Harmonisasi Pelaksanaan Pangan dan Gizi Tahun 2019

Dengan pagu dana sebesar Rp. 76.001.000,- keluaran kegiatan adalah :

- a) Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
- b) Terlaksananya FGD
- c) Terlaksananya Workshop
- d) Terlaksananya penyusunan laporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Hasil kegiatan adalah : Buku Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi untuk menunjang pembangunan bagi SKPD Provinsi dan Kab/Kota. Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 72.326.624,- atau 95,17%

26) Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.907.700,- kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai bahan

acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Membentuk Tim Penulis dari Perguruan Tinggi dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- b) Melakukan rapat-rapat dengan Tim Penulis tentang kebutuhan data dan kemajuan tulisan;
- c) Melakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d) Melakukan pengumpulan data, berdasarkan kebutuhan tim penulis;
- e) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan OPD Provinsi;
- f) Mengikuti FGD EKPD ke Pusat;

Keluaran dari kegiatan ini adalah Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebanyak 100 buku. Realisasi fisik kegiatan sampai akhir Desember 2019 sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 145.830.268,- atau sebesar 99,27%.

27) Kegiatan Akselerasi Capaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya

Dengan pagu dana sebesar Rp.110.000.000,- kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Terlaksananya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam program kegiatan pada lingkup perencanaan sub bidang Sosialbudaya.
- b) Terlaksananya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada sub bidang sosial budaya.
- c) Terfasilitasinya serta terkoordinasinya pelaksanaan program prioritas nasional antara lain Percepatan Penurunan Stunting (Anak Kerdil) di Sumatera Barat

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Rapat koordinasi dengan SKPD Pemerintah Provinsi pada Sub Bidang Sosial Budaya, Kabupaten/kota dan Pemerintah pusat.
- b) Pengumpulan data dan informasi ke Kabupaten/kota.
- c) Rapat Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung Program prioritas nasional
- d) Menghadiri pertemuan-pertemuan di tingkat Nasional terkait dengan isu-isu pembangunan lingkup Sub Bidang SDM

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi (Pemerintah Pusat) serta pengumpulan data data dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan sub bidang sosial budaya.
- b) Tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya Tahun 2019.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan pusat provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan pada sub bidang sosial budaya.
- b) Terfasilitasinya program Prioritas Nasional di daerah
- c) Realisasi Fisik kegiatan sebesar 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.162.237.198,- atau sebesar 97,61%.

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah :

- a) Belum sepenuhnya SKPD lingkup Sosial Budaya mempedomani pencapaian sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada Misi I
- b) Belum seluruhnya SKPD baik di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengetahui dan memahami dengan baik program Prioritas Nasional
- c) Solusi antara lain : Perlu koordinasi yang intens dengan SKPD lingkup Sosial budaya dalam pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada Misi I dan pada pelaksanaan program prioritas nasional.

28) Kegiatan Akselerasi dan Sinkronisasi RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dengan pagu dana sebesar Rp 53.376.350,- output kegiatan yaitu :

- a) Terciptanya Korodinasi RAD Penurunan Emisi gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas RumahKaca (GRK)
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya

Hasil dari pelaksanaan kegiatan : Meningkatnya kualitas dokumen RAD GRK Provinsi Sumatera Barat. Realisasi Fisik Kegiatan sampai akhir Desember 2019 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.51.917.481 atau 97,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.458.869,-

Permasalahan kegiatan yaitu belum optimalnya dalam penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca oleh stakeholders.

Tindak lanjut kegiatan yaitu:

- a) Tahun 2020 kegiatan dilanjutkan dengan nama kegiatan yang sama
- b) Peran stake holders akan lebih dioptimalkan dalam penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca

29) Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 276.762.000,- output kegiatan ini adalah tersedianya rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021. Realisasi fisik kegiatan sebesar 15%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.997.100 atau 14,45%. Kegiatan ini tidak dilanjutkan sehubungan dengan tindak lanjut Surat Dirjen Bina Bangda KEMENDAGRI Nomor : 050/6221/Bangda Tanggal 2 Desember 2019 tentang Revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mengingat prinsip efektif dan efisien Perubahan RPJMD Sumatera Barat disarankan untuk tidak melakukan Perubahan RPJMD mengingat waktu berakhirnya RPJMD kurang dari 3 Tahun dan proses pelaksanaan Penyusunan Perubahan RPJMD berlaku mutatis mutandis. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah mengenai pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dijelaskan melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan.

2.1.1. Perkiraan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2020 dan Capaian Target Renstra 2016-2021

Untuk pencapaian target sasaran yang ditetapkan pada rencana strategis di tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 8 Program, yang terdiri dari 5 Program Non Urusan dengan 26 kegiatan dan 3 Program Urusan dengan 39 kegiatan. Jadi total kegiatan ada sebanyak 65 kegiatan sesuai dengan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.642.198.900,-.

Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s.d tahun berjalan seperti pada lampiran I (Table T-C.29).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bappeda mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan yang mejadi kewenangan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda, sesuai dengan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka dalam rencana kerja tahun 2021 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis badan yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Berdasarkan realisasi capaian target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, maka telah menunjukan hasil yang sangat baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tabel pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2019 sebagaimana berikut :

Tabel 2. 2
Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	1 Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan	100%	100%	100
2	Meningkatkan tata kelola organisasi	2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
		3 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	95%	96.30%	101.36

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja kinerja OPD adalah :

- Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan) sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	435.920.000	422.508.855	96,92	100
1	Pengelolaan website www.bappeda.sumbarprov.go.id	76.864.000	66.460.086	86,46	100
2	Pengelolaan data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan	56.378.600	55.586.291	98,59	100
3	Forum data perencanaan pembangunan provinsi Sumatera Barat	302.677.400	300.462.478	99,27	100
2	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.003.481.839	1.950.148.316	97,34	100
1	Penyusunan buku kerjasama	40.339.600	39.950.986	99,04	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
	pemerintah dan swasta				
2	Pengembangan kapasitas aparatur perencanaan	123.700.480	119.712.274	96,78	100
3	Penyelenggaraan musrenbang penyusunan dokren	292.189.583	290.715.626	99,50	100
4	Revisi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2006-2021	553.248.100	524.161.787	94,74	100
5	Penyusunan KUA/PPAS APBD	158.685.476	151.549.186	95,50	100
6	Penyusunan RKPD	218.287.080	210.814.517	96,58	100
7	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD	159.049.860	156.510.783	98,40	100
8	Pengelolaan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah	68.604.300	67.724.823	98,72	100
9	Implementasi system perencanaan pembangunan daerah	389.377.360	389.008.334	99,91	100
3	PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.073.417.468	5.595.045.836	92,12	97,07
1	Harmonisasi perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi	213.052.500	201.773.553	94,71	100
2	Harmonisasi program/kegiatan pertencanaan penanggulangan kemiskinan daerah	153.006.400	146.272.491	95,60	100
3	Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan provinsi dan kab/kota	236.029.500	235.282.708	99,68	100
4	Pemantauan dan pelaporan manajerial aplikasi PP 39/2006	136.487.000	133.416.694	97,75	100
5	Akselerasi pencapaian sasaran pembangunan sub bidang pemerintah dan aparatur	102.204.000	102.107.968	99,91	100
6	Akselerasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	418.010.000	409.866.484	98,05	100
7	Pengendalian dan evaluasi pembangunan	327.035.400	319.291.719	97,63	100
8	Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Sumatera Barat	429.816.000	394.511.922	91,79	100
9	Harmonisasi progress pelaksanaan	45.470.100	44.583.187	98,05	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
	pencapaian tujuan SDGs				
10	Akselerasi pencapaian sasaran pembangunan sub bidang sumberdaya manusia	108.229.100	103.053.530	95,22	100
11	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	704.000.000	687.935.850	97,72	100
12	Akselerasi dan sinkronisasi pembangunan sanitasi permukiman	92.198.400	86.975.345	94,33	100
13	Akselerasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian dan perikanan	111.699.800	109.714.386	98,22	100
14	Pelaksanaan rakortek pembangunan daerah	270.119.615	267.737.795	99,12	100
15	Pelaksanaan pokja air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	154.511.600	153.651.982	99,44	100
16	Akselerasi dan sinkronisasi perkuatan kelembagaan sumber daya air	68.901.600	58.164.190	98,75	100
17	Akselerasi dan sinkronisasi perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha	104.899.900	103.373.509	98,54	100
18	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	64.788.100	64206.613	99,10	100
19	Harmonisasi perencanaan makro dan pendanaan pembangunan	159.477.600	154.836.576	97,09	100
20	Harmonisasi program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal	74.283.396	69.990.390	94,22	100
21	Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	487.096.057	393.875.198	80,86	100
22	Harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang social budaya dan pemerintah	508.573.300	495.500.556	97,43	100
23	Akselerasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan LH	164.749.050	163.081.578	98,99	100
24	Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat	285.732.000	278.404.590	97,44	100
25	Harmonisasi program dan kegiatan pangan dan gizi	76.001.000	72.326.624	95,17	100
26	Evaluasi kinerja pembangunan daerah	146.907.700	145.830.268	99,27	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
27	Akselerasi pencapaian sasaran pembangunan sub bidang Sosial Budaya	110.000.000	107.365.549	97,61	100
28	Akselerasi dan harmonisasi rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca	53.376.350	51.917.481	97,27	100
29	Penyusunan rancangan perubahan RPJMD 2016-2021	276.762.000	39.997.100	14,45	15
	TOTAL	8.512.819.307	7.967.703.007	95,46	99,02

Dari tabel 2.3 terlihat serapan anggaran untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 95.46% dan fisik sebesar 99.02%. Terdapat sisa anggaran yang disebabkan adanya realisasi keuangan pada beberapa kegiatan yang di bawah target yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Website www.bappeda.sumbar-prov.go.id, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.864.000,- kegiatan ini bertujuan untuk terinformasikannya data dan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan sekretariat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya updating berita dan data pembangunan serta terlaksananya koordinasi pengelola website www.bappeda.sumbarprov.go.id. Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019, realisasi fisik 100% sedangkan keuangan sebesar Rp. 66.460.086,- atau 86,46%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemui masalah, namun rendahnya realisasi keuangan karena ada honor tenaga IT yang dialokasikan namun tidak bisa direalisasikan dan honor operator website yang membuat berita yang dibayarkan sesuai dengan ada atau tidaknya berita yang diserahkan kepada pengelola website.
2. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021, Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 276.762.000,- output kegiatan ini adalah tersedianya rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021. Realisasi fisik kegiatan sebesar 15%, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.997.100 atau 14,45%. Kegiatan ini tidak dilanjutkan sehubungan dengan tindak lanjut Surat Dirjen Bina Bangda KEMENDAGRI Nomor : 050/6221/Bangda Tanggal 2 Desember 2019 tentang Revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan

bahwa mengingat prinsip efektif dan efisien Perubahan RPJMD Sumatera Barat disarankan untuk tidak melakukan Perubahan RPJMD mengingat waktu berakhirnya RPJMD kurang dari 3 Tahun dan proses pelaksanaan Penyusunan Perubahan RPJMD berlaku mutatis mutandis. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah mengenai pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dijelaskan melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan.

- Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) seperti pada berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.063.798.308	6.030.647.34	99,45	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	39.420.000	39.420.000	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik	879.600.000	873.910.749	99,35	100
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	842.347.000	834.188.630	99,03	100
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	328.450.000	326.195.050	99,31	100
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	71.389.000	68.099.013	95,39	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	75.238.310	72.855.677	96,83	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.000.000	88.338.828	98,15	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik	44.490.276	42.990.849	96,63	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	44.702.100	40.729.050	91,11	100
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.585.161.622	3.583.271.528	99,95	100
11	Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental	16.000.000	13.750.000	85,94	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	47.000.000	46.898.000	99,78	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.036.182.933	1.984.802.303	97,48	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
1	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	26.750.000	25.978.500	97,12	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	300.409.000	283.903.500	94,51	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	131.465.000	126.562.303	96,27	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	47.200.000	45.650.000	96,72	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala computer dan jaringan komputerisasi	72.344.900	69.093.000	95,51	100
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	258.014.033	256.615.000	99,46	100
7	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.200.000.000	1.177.000.000	98,08	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	71.250.000	71.250.000	100	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	71.250.000	71.250.000	100	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	184.624.800	167.350.300	90,64	100
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	184.624.800	167.350.300	90,64	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	758.210.967	752.236.857	99,21	100
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	52.059.300	50.900.165	97,77	100
2	Penatausahaan keuangan SKPD	326.479.000	324.868.42	99,51	100
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	253.184.000	252.565.420	99,76	100
	TOTAL	9.114.067.008	3.578.704.194	97,36	100

Dari tabel 2.4 terlihat serapan anggaran untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu dengan realisasi sebesar 97.36% dan fisik sebesar 100%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum dipedomaninya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannyasebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
7. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
9. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perencana;
10. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
11. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
12. Belum dipedomaninya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
13. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;
14. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannyasebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
15. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
16. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumbar selama kurun waktu lima tahun ke belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu :

Tabel 2.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Manajemen sumber daya aparatur	41.2% aparatur memiliki kualifikasi pendidikan wsws menengah dan 58.8% aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1	Pola manajerial yang kurang memperhatikan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terjadi	Cepatnya perkembangan arus informasi berpengaruh kepada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi	Koordinasi dan konsolidasi internal Bappeda yang perlu ditingkatkan
Sistem dan tata kerja lembaga	Hampir semua system dan tata kerja sudah memiliki <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) namun belum sepenuhnya diimplementasikan	Penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap aparatur yang menerapkan SOP secara baik dan benar	Adanya kebijakan Pemerintah terkait Revolusi Mental yang diejawantahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah	Perlunya peningkatan system dan tatakerja lembaga yang lebih efektif dan efisien
Koordinasi, komitmen, dan tanggung jawab internal maupun antar PD	Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar PD	Penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap PD yang tidak berkoordinasi dengan Bappeda dan tidak mengikuti dokumen perencanaan pembangunan	PD yang cenderung tidak mentaati dokumen hasil perencanaan pembangunan	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan
Pengelolaan data dan informasi perencanaan	Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan belum maksimal sebagai masukan bagi analisis pembangunan dan penelitian	Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung untuk mengelola data dan informasi pembangunan	Tuntutan perkembangan zaman memaksa pola pengelolaan data dan informasi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi	Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan
Pelayanan publik	Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal dalam rangka diseminasi informasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta sumber daya aparatur yang professional dan inovatif	Tuntutan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi	Peningkatan kinerja lembaga dalam aspek layanan publik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Rancangan awal RKPD Tahun 2021 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Bappeda. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Bappeda harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Bappeda.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program dan kegiatan, namun terdapat beberapa jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda. Hal ini sejalan dengan hasil revidi APIP terhadap Rancangan RKPD dimana rencana program dan pagu anggaran Bappeda belum seluruhnya konsisten antara RPJMD dengan RKPD, dimana masih ditemui Program memiliki pagu dana dalam RPJMD tapi tidak tersedia dananya pada RKPD.

Adapun Program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada anggarannya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Hasil Analisa Kebutuhan Anggaran dengan Rancangan Awal RKPD

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Selisih
		Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisa Kebutuhan	
I	Program Perencanaan Pembangunan daerah			
1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	931.000.000	881.000.000	50.000.000
II	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	1.389.000.000	1.189.000.000	200.000.000
2	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	775.000.000	725.000.000	50.000.000
3	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	590.000.000	540.000.000	50.000.000
4	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	493.000.000	443.000.000	50.000.000
5	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	957.000.000	907.000.000	50.000.000
6	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	548.000.000	498.000.000	50.000.000
	Jumlah	5.683.000.000	5.183.000.000	500.000.000

Hasil analisa kebutuhan pagu anggaran tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada lampiran II Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, diperlukan untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang timbul saat pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020.

Permasalahan-permasalahan yang timbul sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjankit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan di hampir seluruh wilayah di Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan koreksi yang cukup dalam terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Keadaan ini tentu harus dikendalikan dan menjadi prioritas bagi seluruh elemen penyelenggara pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana arahan Presiden dalam Pembukaan Musrenbangnas RKP Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 yang dilakukan melalui Video Convenrence yang mengamanatkan bahwa fokus pembangunan Tahun 2021 harus mendukung upaya pemulihan terkait dengan dampak penyebaran pandemic Covid -19 diseluruh sektor. sehingga arahan tersebut menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada Tahun 2021 dengan tanpa mengabaikan kinerja yang ingin dicapai dalam dokumen RPJMD meskipun pada akhirnya akan terjadi koreksian yang cukup signifikan dalam pencapaian target-target makro pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan yang berupa program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat tidak ditemui pada program dan kegiatan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, tetapi ada beberapa usulan yang berasal dari Forum Anak se Sumatera Barat yang bisa dirumuskan menjadi Indikator kegiatan di Bappeda diantaranya :

1. Forum Anak mengharapkan adanya pelatihan Musrenbang bagi Forum Anak se Sumatera Barat, agar Forum anak dapat berperan besar dalam menyusun rencana pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Tanggapan yang diberikan oleh Bappeda adalah :

- Pelatihan Musrenbang bagi Forum Anak se Sumatera Barat dapat ditampung dalam bentuk pelaksanaan rapat koordinasi dalam Kegiatan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan agar Forum anak lebih mendapatkan informasi serta dapat berperan dalam menyusun rencana pembangunan Daerah.

2. Forum Anak mendorong Bappeda Provinsi untuk memasukkan program Provinsi Layak Anak sebagai salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi serta mendorong Kab/kota untuk juga memasukkan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten/Kota

Tanggapan yang diberikan oleh Bappeda adalah :

- Program Provinsi Layak Anak diupayakan untuk menjadi salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi

3. Forum Anak mengharapkan adanya kegiatan di Bappeda yaitu Sahabat Anak dimana kegiatan ini dilakukan tiap tahunnya bertujuan supaya Bappeda paham dan tahu bagaimana kendala permasalahan yang dialami oleh anak-anak di daerah sumbar langsung tanpa perantara apapun. Kegiatan ini dilakukan tiap tahun karena permasalahan anak yang akan timbul di daerah tersebut akan berbeda tiap tahunnya.

Tanggapan yang diberikan oleh Bappeda adalah :

- Kegiatan ini dapat ditampung dalam bentuk pelaksanaan rapat koordinasi dalam Kegiatan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya

4. Menetapkan program penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak sebagai target capaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan di bawah koordinasi Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak, yaitu: Kepala Bappeda atau Sekretaris Daerah

Tanggapan yang diberikan oleh Bappeda adalah :

- Program Provinsi Layak Anak diupayakan untuk menjadi salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Kebijakan Nasional tersebut ditindak lanjuti dengan arahan Presiden sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM.
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Penyederhanaan Regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

Agenda Pembangunan Nasional untuk Periode RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pembangunan di Sumatera Barat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menelaah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada prioritas pembangunan nasional. Rumusan kebijakan tersebut perlu dilakukan melalui telaahan terhadap prioritas nasional dalam RKP Tahun 2021

Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 dan dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan pada :

1. Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi
2. Reformasi sistem kesehatan nasional
3. Reformasi sistem perlindungan sosial
4. Reformasi sistem ketahanan bencana

Sehingga sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan, dengan indikator pembangunan yakni :

Tabel 3.1**Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021**

Indikator Pembangunan	Target 2024 pada RPJMN 2020-2024	Target 2021 (Revisi akibat Dampak Covid-19)		
		Nasional	Pulau Sumatera	Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 - 6,5	4,5-5,5	3,9 – 5,1	4,9 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,6 - 4,3	7,5-8,2	7,2	7,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,2	9,2-9,7	9,6	6,4

Sumber Data : Olahan Bappenas dengan mempertimbangkan pemulihan akibat pandemic Covid-19

3.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 secara umum ditujukan untuk :

1. Menjadi acuan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2021.

Secara khusus berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di bidang perencanaan pembangunan, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah:

1. Terwujudnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Terwujudnya Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan daerah

3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang telah dirumuskan di dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas SDM perencana.
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
3. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
5. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya pembinaan, fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
4. Penggunaan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan
5. Meningkatnya pengelolaan organisasi

Sasaran tersebut dalam rangka mewujudkan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di tahun ke- 5 (lima) pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat ,yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan capaian kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antar dokumen perencanaan dengan tingkat kesesuaian 100 %.
2. Meningkatkan tata kelola organisasi dengan capaian A untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan tercapainya realisasi program dan kegiatan tepat waktu sebesar 96 %.

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan Renja Tahun 2021 masih mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan 8 program dan 65 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 24.126.000.000,- sebagaimana terlihat pada tabel lampiran III.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dilakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan yang menjadi lampiran dalam Renja 2021. Hasil pemetaan yang sudah dilakukan terdapat 5 program, 16 kegiatan dan 77 sub kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 34.316.600.516,- sebagaimana terlihat pada tabel lampiran IV.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 6) Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Program / Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No	Program / Kegiatan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Mass Media)
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
11	Penyediaan Jasa pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3	Pengadaan Kendaraan Dinas
4	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi
8	Pemeliharaan Rutin/ Komputer dan Jaringan Komputer
9	Rehabilitasi Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
2	Penatausahaan Keuangan SKPD
3	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
VI	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan
1	Pengelolaan website www.bappedasumbar.go.id
2	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

No	Program / Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan
4	Pembuatan Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan
2	Penyusunan RKPD
3	Penyusunan KUA PPAS APBD
4	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta
6	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana
7	Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah
8	Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
9	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana
10	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Provinsi Sumatera Barat
VIII	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional
2	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs
3	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
4	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah
5	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal
6	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan
7	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah
8	Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi
9	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
10	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
11	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai PP No 39 Tahun 2006
12	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
13	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

No	Program / Kegiatan
14	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan
15	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat
16	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia
17	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya
18	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
19	Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat
20	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
21	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
22	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi
23	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
24	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
25	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman
26	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan
27	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
28	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha

Dengan mulai diberlakukannya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Tahun 2021, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan mapping Program/kegiatan sesuai peraturan dimaksud.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program dan kegiatan tahun 2021 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Bappeda Tahun 2021 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan dalam kerangka penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Bappeda. Diharapkan semua aparatur dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tergambar dalam laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda secara bersama-sama mempuyai tanggungjawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Padang, Juli 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



HANSASTRI, SE, Ak, MM, CfrA

Pembina Utama Madya

NIP. 19641013 199103 1 001

LAMPIRAN I

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Barat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			Tabel		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
		BADAN PERENCANAAN				83.860.604.402		25.595.216.642		17.480.176.848		16.973.989.841	109,83	97,10			42.569.206.483	110,28	50,76		
		NON URUSAN				30.394.795.162		11.989.413.187		8.807.170.694		9.006.286.834	100,10	102,26			20.995.700.021	99,26	69,08		
	3.00.02.011	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	300,00	18.016.805.621	300,00	7.836.363.125	100,00	5.864.161.461	100,00	6.030.647.374	100,00	102,84		400,00	13.867.010.499	133,33	76,97		
1	3.00.02.011.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	72,00	292.226.000	36,00	111.586.540	12,00	39.420.000	12,00	39.420.000	100,00	100,00		48,00	151.006.540	66,67	51,67	BAPPEDA	Kota Padang,
2	3.00.02.011.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan (ATK, Perlengkapan kantor)	72,00	464.227.741	36,00	206.166.351	12,00	75.238.310	12,00	72.855.677	100,00	96,83		48,00	279.022.028	66,67	60,10	BAPPEDA	Kota Padang,
3	3.00.02.011.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan Penggandaan	%	100,00	520.637.116		178.830.593	100,00	90.000.000	100,00	88.338.828	100,00	98,15		100,00	267.169.421	100,00	51,32	BAPPEDA	Kota Padang,
4	3.00.02.011.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	bulan (baterai, bola lampu, MCB dll)	72,00	300.887.181	36,00	104.555.582	12,00	49.489.533	12,00	42.990.849	100,00	86,87		48,00	147.546.431	66,67	49,04	BAPPEDA	Kota Padang,
5	3.00.02.011.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku-buku	majalah dan buku-buku	3,00	306.926.290		99.356.770	1,00	51.422.100	1,00	40.729.050	100,00	79,21		1,00	140.085.820	33,33	45,64	BAPPEDA	Kota Padang,
				jenis koran	9,00				6,00		6,00		100,00		6,00		66,67		BAPPEDA	Kota Padang,	
6	3.00.02.011.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	bulan	16,00	258.775.930		77.618.000	12,00	28.600.000	12,00	46.898.000	100,00	163,98		12,00	124.516.000	75,00	48,12	BAPPEDA	Kota Padang,
7	3.00.02.011.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi ke luar dan dalam daerah	bulan	72,00	4.443.196.174	36,00	1.900.657.390	12,00	3.392.205.518	12,00	3.583.271.528	100,00	105,63		48,00	5.483.928.918	66,67	123,42	BAPPEDA	Kota Padang,
8	3.00.02.011.8	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya pembayaran jasa penceramah agama, instruktur senam, dan jasa publikasi	(3.) paket		594.900.000		272.915.200	1,00	16.000.000	1,00	13.750.000	100,00	85,94		1,00	286.665.200	0,00	48,19	BAPPEDA	Kota Padang,
				(2.) kali					48,00		48,00		100,00		48,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
				(1.) kali					48,00		48,00		100,00		48,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
9	3.00.02.011.9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan internet	%	200,00	6.115.900.226		2.790.565.957	100,00	879.600.000	100,00	873.910.749	100,00	99,35		100,00	3.664.476.706	50,00	59,92	BAPPEDA	Kota Padang,
				bulan					12,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
10	3.00.02.011.10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	kursi 4 dudukan		50.000.000		0	1,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!		0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDA	Kota Padang,
				kursi rapat					1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
				Lambang negara					1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
				Spanduk					1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
				tempat spanduk					1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
				Bendera					1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
				AC					1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
				lemari					1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
				meja					1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
11	3.00.02.011.11	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor	unit	60,00	422.177.000	27,00	136.977.030	12,00	71.389.000	12,00	68.099.013	100,00	95,39		39,00	205.076.043	65,00	48,58	BAPPEDA	Kota Padang,

		Program/Kegiatan			(akhir periode Kenstra Perangkat Daerah)		Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		(Kenja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			Tabel		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
12	3.00.02.011.12	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	- Tersedianya jasa petugas dan peralatan kebersihan kantor - Tersedianya jasa sopir kantor - Tersedianya jasa petugas dan peralatan keamanan kantor	%	200,00	3.746.951.963		1.957.133.712	100,00	842.347.000	100,00	834.188.630	100,00	99,03		100,00	2.791.322.342	50,00	74,50	BAPPEDA	Kota Padang,
				orang (11 orang petugas kebersihan - 3 sopir - 10 orang jasa pengamanan)					24,00		24,00		100,00			24,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
13	3.00.02.011.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit (spanduk, bendera, merawa, alat pendingin, meja dan kursi rapat, rangka besi tempat spanduk, karpet mushalla, mic rapat, kamera dan sofa tamu)	16,00	500.000.000		0	11,00	328.450.000	11,00	326.195.050	100,00	99,31		11,00	326.195.050	68,75	65,24	BAPPEDA	Padang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		70,49	55,83		
Predikat Kinerja																		S	R		
	3.00.02.012	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	%	300,00	5.832.172.161	300,00	2.034.434.266	100,00	1.986.182.933	100,00	1.984.802.303	100,00	99,93		400,00	4.019.236.569	133,33	68,91		
			Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau=3); kuning=2; merah=1	zona	9,00		9,00		3,00		0,00		0,00			9,00		100,00			
1	3.00.02.012.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Terlaksananya pemeliharaan Soundsystem, perawatan telepon dan fax, perbaikan jaringan instalasi telepon dan fax, Kamera serta perbaikan CCTV	(1.) unit	4,00	93.249.550		29.262.500	2,00	26.750.000	2,00	25.978.500	100,00	97,12		2,00	55.241.000	50,00	59,24	BAPPEDA	Kota Padang,
				(2.) unit	20,00				10,00		10,00		100,00			10,00		50,00		BAPPEDA	Kota Padang,
				(3.) paket	5,00				1,00		1,00		100,00			1,00		20,00		BAPPEDA	Kota Padang,
2	3.00.02.012.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	bulan	72,00	1.291.246.455	36,00	480.004.716	12,00	300.409.000	12,00	283.903.500	100,00	94,51		48,00	763.908.216	66,67	59,16	BAPPEDA	Kota Padang,
3	3.00.02.012.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional	unit	24,00	925.777.024		364.146.750	12,00	131.465.000	12,00	126.562.303	100,00	96,27		12,00	490.709.053	50,00	53,01	BAPPEDA	Kota Padang,
4	3.00.02.012.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengisian tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan AC dan pompa air serta perbaikan mesin fotocopy	unit mesin fotocopy	2,00	314.639.247		108.205.400	1,00	47.200.000	1,00	45.650.000	100,00	96,72		1,00	153.855.400	50,00	48,90	BAPPEDA	Kota Padang,
				kali (pemeliharaan AC)	65,00				60,00		60,00		100,00			60,00		92,31		BAPPEDA	Kota Padang,
				Tabung Pemadam Kebakaran	20,00				10,00		10,00		100,00			10,00		50,00		BAPPEDA	Kota Padang,
				buah (pompa air)	7,00				6,00		6,00		100,00			6,00		85,71		BAPPEDA	Kota Padang,
5	3.00.02.012.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya pembuatan pagar antar gedung kantor, perluasan mushalla, perluasan tempat parkir dan nama/merek kantor	%	400,00	948.900.000		0	100,00	258.014.033	175,00	256.615.000	175,00	99,46		175,00	256.615.000	43,75	27,04	BAPPEDA	Kota Padang,

		Program/Kegiatan			(akhir periode Kenstra Perangkat Daerah)	Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)	(Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Penanggung Jawab								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		Tabel	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
				paket	6,00				4,00		4,00			4,00		66,67		BAPPEDA	Kota Padang,		
6	3.00.02.012.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer dan suku cadang	bulan	72,00	458.359.885	36,00	234.894.900	12,00	72.344.900	12,00	69.093.000	100,00	95,51		48,00	303.987.900	66,67	66,32	BAPPEDA	Kota Padang,
7	3.00.02.012.7	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas jabatan/operasional roda empat	unit	4,00	1.800.000.000	2,00	817.920.000	2,00	1.150.000.000	2,00	1.177.000.000	100,00	102,35		4,00	1.994.920.000	100,00	110,83	BAPPEDA	Padang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	60,91	60,64			
Predikat Kinerja																	R	R			
	3.00.02.013	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	%	300,00	514.560.000	300,00	205.620.000	100,00	71.250.000	100,00	71.250.000	100,00	100,00		400,00	276.870.000	133,33	53,81		
1	3.00.02.013.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian	stel	750,00	514.560.000	250,00	205.620.000	100,00	71.250.000	100,00	71.250.000	100,00	100,00		350,00	276.870.000	46,67	53,81	BAPPEDA	Kota Padang,
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	46,67	53,81			
Predikat Kinerja																	SR	R			
	3.00.02.014	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Provinsi	orang	18,00	1.749.902.980		509.942.681	4,00	124.624.800	4,00	167.350.300	100,00	134,28		4,00	677.292.981	22,22	38,70		
			Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi	orang	9,00				2,00		2,00		100,00		2,00			22,22			
			Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	JPL/orang/tahun	140,00				30,00		30,00		100,00		30,00			21,43			
			Fungsional Perencana Pertama pada Bappeda Provinsi	orang	29,00				7,00		7,00		100,00		7,00			24,14			
1	3.00.02.014.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	orang	90,00	1.749.902.980	11,00	509.942.681	25,00	124.624.800	25,00	167.350.300	100,00	134,28		36,00	677.292.981	40,00	38,70	BAPPEDA	Kota Padang,
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	40,00	38,70			
Predikat Kinerja																	SR	SR			
	3.00.02.015	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	300,00	4.281.354.400	300,00	1.403.053.115	100,00	760.951.500	100,00	752.236.857	100,00	98,85		400,00	2.155.289.972	133,33	50,34		
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	300,00		300,00		100,00		100,00		100,00		400,00		133,33				
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	%	300,00		300,00		100,00		100,00		100,00		400,00		133,33				
			Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	%	300,00		300,00		100,00		100,00		100,00		400,00		133,33				
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD [AA (>90-100); A (>80-90); BB (>70-80); B (>60-70); CC (>50-60); C (>30-50); D (0-30);]	Predikat	240,00		240,00		80,00		161,00		201,25		401,00		167,08				
1	3.00.02.015.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (LAKIP, LPPD dan LKPJ Bappeda)	%	300,00	910.711.600		166.291.600	100,00	244.184.000	100,00	252.565.420	100,00	103,43		100,00	418.857.020	33,33	45,99	BAPPEDA	Kota Padang,
				dokumen					3,00		3,00		100,00		3,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
2	3.00.02.015.2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pembayaran honor penatausahaan SKPD Bappeda	bulan	72,00	2.541.994.600	36,00	1.061.458.823	12,00	326.479.000	12,00	324.868.472	100,00	99,51		48,00	1.386.327.295	66,67	54,54	BAPPEDA	Kota Padang,
3	3.00.02.015.3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya buku kalender perencanaan, Renja dan DPA	%	300,00	480.338.200		107.792.692	100,00	96.059.300	100,00	50.900.165	100,00	52,99		100,00	158.692.857	33,33	33,04	BAPPEDA	Kota Padang,
				dokumen					3,00		3,00		100,00		3,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
4	3.00.02.015.4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD	bulan	48,00	348.310.000		67.510.000	12,00	94.229.200	12,00	123.902.800	100,00	131,49		12,00	191.412.800	25,00	54,95	BAPPEDA	Kota Padang,
				orang					5,00		5,00		100,00		5,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	39,58	47,13			
Predikat Kinerja																	SR	SR			
	3	PENUNJANG URUSAN																			

		Program/Kegiatan			(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)	(Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Penanggung Jawab								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		Tabel	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	3.00.02.	PENUNJANG PERENCANAAN				53.465.809.240		13.605.803.455		8.673.006.154		7.967.703.007	119,56	91,87		K	Rp	K	Rp		
	3.00.02.1	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi	%	315,00	2.116.010.000	225,00	805.017.855	75,00	444.920.000	115,00	422.508.855	153,33	94,96		340,00	1.227.526.710	107,94	58,01		
			Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)	%	370,00		270,00		90,00		130,00		144,44		400,00		108,11				
1	3.00.02.1.1	Pengelolaan Website Www.bappeda.sumbarprov.go.id	Updating berita pada website bappeda.sumbarprov.go.id	tahun	6,00	299.500.000	3,00	98.703.510	1,00	85.864.000	1,00	66.460.086	100,00	77,40		4,00	165.163.596	66,67	55,15	BAPPEDA	Kota Padang,
2	3.00.02.1.2	Pengelolaan Data Dan Informasi Spasial Berbasis GIS Untuk Perencanaan Pembangunan		kab/kota	36,00	1.108.000.000		352.675.468	19,00	56.378.600	19,00	55.586.291	100,00	98,59		19,00	408.261.759	52,78	36,85	BAPPEDA	Kota Padang
3	3.00.02.1.3	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Forum Data dan Informasi dan Terupdate Database, Data Informasi perencanaan Pembangunan Sumatera Barat	kali	24,00	708.510.000	12,00	353.638.877	4,00	302.677.400	4,00	300.462.478	100,00	99,27		16,00	654.101.355	66,67	92,32	BAPPEDA	Padang
			orang						400,00		400,00		100,00			400,00		0,00		BAPPEDA	Padang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		62,04	61,44		
Predikat Kinerja																		R	R		
	3.00.02.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPD kabupaten/kota dengan RKPD Provinsi	%	280,00	14.511.100.200	270,00	5.089.992.352	90,00	1.979.881.839	90,00	1.950.148.316	100,00	98,50		360,00	7.040.140.668	128,57	48,52		
			Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi	%	300,00		300,00		100,00		100,00		100,00		400,00		133,33				
1	3.00.02.2.1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	Musrenbang RKPD Tahun 2020	dokumen	12,00	3.265.350.000	6,00	1.426.449.874	1,00	291.427.283	1,00	290.715.626	100,00	99,76		7,00	1.717.165.500	58,33	52,59	BAPPEDA	Kota Padang, / -
			buku laporan						10,00		10,00		100,00			10,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
2	3.00.02.2.2	Penyusunan KUA/PPAS APBD	Tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2020	dokumen	12,00	1.262.620.000	6,00	690.002.087	2,00	146.885.476	2,50	151.549.186	125,00	103,18		8,50	841.551.273	70,83	66,65	BAPPEDA	Kota Padang,
			buku						650,00		650,00		100,00			650,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
3	3.00.02.2.3	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD	Tersusunnya KUA PPAS Perubahan tahun 2019	%	500,00	1.262.620.000	300,00	594.106.483	100,00	148.012.160	100,00	156.510.783	100,00	105,74		400,00	750.617.266	80,00	59,45	BAPPEDA	Kota Padang,
			dokumen						2,00		2,00		100,00			2,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
4	3.00.02.2.4	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	modul	10,00	2.509.710.200		1.168.991.756	5,00	389.377.360	5,00	389.008.334	100,00	99,91		5,00	1.558.000.090	50,00	62,08	BAPPEDA	Padang
			kali (pelatihan)						4,00		4,00		100,00			4,00		0,00		BAPPEDA	Padang
5	3.00.02.2.5	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah Dan Swasta	Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Book)	dokumen	2,00	838.750.000		315.785.948	1,00	40.339.600	1,00	39.950.986	100,00	99,04		1,00	355.736.934	50,00	42,41	BAPPEDA	Kota Padang,
			buku						50,00		50,00		100,00			50,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
6	3.00.02.2.6	Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Revisi Perda RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Jenis Dokumen	1,00	2.631.640.000	0,00	0	1,00	553.248.100	1,00	524.161.787	100,00	94,74		1,00	524.161.787	100,00	19,92	BAPPEDA	Sumatera Barat
7	3.00.02.2.7	PenyusunanN RKPD	buku RKPD tahun 2020 dan RKPD Perubahan 2019	Dokumen	12,00	1.727.410.000	6,00	695.379.277	2,00	218.287.080	2,00	210.814.517	100,00	96,58		8,00	906.193.794	66,67	52,46	BAPPEDA	Kota Padang,
			buku						160,00		160,00		100,00			160,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,

		Program/Kegiatan			(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		(Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			Tabel		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
8	3.00.02.2.8	Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah	Terlaksananya Dokumentasi, Informasi dan Penyebarluasan Dokumen Perencanaan	%	300,00	429.000.000		199.276.927	100,00	68.604.300	100,00	67.724.823	100,00	98,72		100,00	267.001.750	33,33	62,24	BAPPEDA	Kota Padang,
				OPD Prov					50,00		50,00		100,00			50,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
				kab/kota					19,00		19,00		100,00			19,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
				media cetak					2,00		2,00		100,00			2,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
9	3.00.02.2.9	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	Persentase realisasi angka kredit Fungsional Perencana - Terlaksananya Rapat Tim Penilai Angka Kredit Perencana - Terlaksananya Pertemuan Berkala Perencana Sumatera Barat - Terlaksananya Sosialisasi JFP dan Presentasi Makalah Perencanaan Pembangunan - Terlaksananya Pelatihan Penulisan Artikel dan Karya Ilmiah - Terlaksananya Seminar Daerah Perencanaan Pembangunan - Terlaksananya rapat kerja AP21 Sumbar	kali	25,00	584.000.000		0	9,00	123.700.480	9,00	119.712.274	100,00	96,78		9,00	119.712.274	36,00	20,50	BAPPEDA	Kota Padang,
				%	300,00				100,00		100,00		100,00			100,00		33,33		BAPPEDA	Kota Padang,
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		64,28	48,70		
Predikat Kinerja																		R	SR		
	3.00.02.3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	280,00	36.838.699.040	270,00	7.710.793.248	90,00	6.248.204.315	90,00	5.595.045.836	100,00	89,55		360,00	13.305.839.084	128,57	36,12		
1	3.00.02.3.1	Kerjasama Ekonomi Regional Dan Internasional ok	1. Laporan Kerjasama Ekonomi Regional dan International. 2. Mengikuti Rakorgub se Wilayah Sumatera 3. Mengikuti Rapat Teknis Rakorgub se Wilayah Sumatera, 4. Mengikuti Kegiatan IMT-GT ,5. Mengikuti kegiatan kerjasama dengan lembaga donatur internasional	(2.)kali	2,00	6.005.500.000		2.497.329.236	1,00	440.696.800	1,00	393.875.198	100,00	89,38		1,00	2.891.204.434	50,00	48,14	BAPPEDA	Kota Padang
				(5.)Kementrian					8,00		8,00		100,00			8,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				(1.) Dokumen					1,00		1,00		100,00			1,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				(3.)kali					3,00		3,00		100,00			3,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				buku					5,00		5,00		100,00			5,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				(4.)Negara					4,00		4,00		100,00			4,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
2	3.00.02.3.2	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi RAD SDGs di Sumatera Barat	kali rapat	5,00	526.600.000		166.091.134	2,00	33.604.400	2,00	44.583.187	100,00	132,67		2,00	210.674.321	40,00	40,01	BAPPEDA	Kota Padang
				jenis (dokumen SDGs)					1,00		1,00		100,00			1,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
3	3.00.02.3.3	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah	laporan	6,00	1.712.600.000	3,00	640.984.636	1,00	154.556.400	1,00	146.272.491	100,00	94,64		4,00	787.257.127	66,67	45,97	BAPPEDA	Kota Padang
				laporan					1,00		1,00		100,00			1,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				kali					2,00		2,00		100,00			2,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				orang (peserta)					320,00		320,00		100,00			320,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
4	3.00.02.3.4	Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan implementasi program IPDMIP	laporan	4,00	398.075.000	1,00	116.713.008	1,00	704.000.000	1,00	687.935.850	100,00	97,72		2,00	804.648.858	50,00	202,13	BAPPEDA	Sumatera Barat
				kali					5,00		5,00		100,00			5,00		0,00		BAPPEDA	Sumatera Barat

		Program/Kegiatan			(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)	(Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Penanggung Jawab								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		Tabel	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
5	3.00.02.3.5	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan PDT	laporan	6,00	831.920.000	3,00	376.968.751	1,00	73.926.000	1,00	69.990.390	100,00	94,68		4,00	446.959.141	66,67	53,73	BAPPEDA	Kota Padang
				kali				3,00		3,00		100,00				3,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
6	3.00.02.3.6	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018	dokumen	4,00	1.186.200.000	2,00	610.516.755	1,00	146.907.700	1,00	145.830.268	100,00	99,27		3,00	756.347.023	75,00	63,76	BAPPEDA	Padang
				Buku				100,00		100,00		100,00				100,00		0,00		BAPPEDA	Padang
7	3.00.02.3.7	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006	Pemantauan dan Evaluasi Laporan Manajerial Konsolidasi Triwulanan melalui e-Monev Bappenas sesuai PP No. 39 Tahun 2006	triwulan	12,00	651.000.000	0	4,00	136.487.000	4,00	133.416.694	100,00	97,75			4,00	133.416.694	33,33	20,49	BAPPEDA	Kota Padang,
8	3.00.02.3.8	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi yang harmonis dan sinkron	orang	800,00	1.463.160.000		0	200,00	278.052.500	200,00	201.773.553	100,00	72,57		200,00	201.773.553	25,00	13,79	BAPPEDA	Kota Padang
				laporan				1,00		1,00		100,00				1,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				SKPD				10,00		10,00		100,00				10,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				Kab/Kota				19,00		19,00		100,00				19,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				Kementerian terkait dan Luar Negeri				11,00		11,00		100,00				11,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
9	3.00.02.3.9	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah; monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota; koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ke pusat	(3.) kali	300,00	1.333.000.000	120,00	0	60,00	327.035.400	60,00	319.291.719	100,00	97,63		180,00	319.291.719	60,00	23,95	BAPPEDA	Kota Padang,
				(4.) Kab/Kota				19,00		19,00		100,00				19,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang,
10	3.00.02.3.10	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan yang sinkron	orang	800,00	1.079.864.140	200,00	252.423.081	200,00	111.699.800	200,00	109.714.386	100,00	98,22		400,00	362.137.467	50,00	33,54	BAPPEDA	Sumatera Barat
				laporan				1,00		1,00		100,00				1,00		0,00		BAPPEDA	Sumatera Barat
				(2.) kali				19,00		19,00		100,00				19,00		0,00		BAPPEDA	Sumatera Barat
				(1.) kali				1,00		1,00		100,00				1,00		0,00		BAPPEDA	Sumatera Barat
11	3.00.02.3.11	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Perencanaan akselerasi dan sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha yang sinkron	orang	800,00	1.078.613.650	200,00	233.110.443	200,00	104.899.900	200,00	103.373.509	100,00	98,54		400,00	336.483.952	50,00	31,20	BAPPEDA	Kota Padang
				kali				1,00		1,00		100,00				1,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				laporan				1,00		1,00		100,00				1,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				Kab/Kota				19,00		19,00		100,00				19,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				Kab/Kota				19,00		19,00		100,00				19,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				Kementerian terkait				8,00		8,00		100,00				8,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				OPD				8,00		8,00		100,00				8,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
12	3.00.02.3.12	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang sinkron	buku laporan	40,00	1.106.500.000	10,00	0	10,00	164.749.050	0,00	163.081.578	0,00	98,99		10,00	163.081.578	25,00	14,74	BAPPEDA	Kota Padang
				orang				80,00		0,00		0,00				0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang
				laporan				1,00		0,00		0,00				0,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang

		Program/Kegiatan			(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		(Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			Tabel		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
13	3.00.02.3.13	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	RAD Penurunan Emisi Gaas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) , Rakor penurunan emisi gas rumah kaca	orang	500,00	572.950.000			0	50,00	53.376.350	50,00	51.917.481	100,00	97,27		50,00	51.917.481	10,00	9,06	BAPPEDA	Kota Padang
				kali						1,00		1,00		100,00		1,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang	
				%						100,00		100,00		100,00		100,00		0,00		BAPPEDA	Kota Padang	
14	3.00.02.3.14	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dan Naskah akademis pembangunan infrastruktur berkelanjutan	orang	500,00	1.434.580.000	200,00		0	100,00	418.010.000	100,00	409.866.484	100,00	98,05		300,00	409.866.484	60,00	28,57	BAPPEDA	Sumatera Barat
				laporan						1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat	
				dokumen						1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat	
				kali						4,00		4,00		100,00		4,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat	
15	3.00.02.3.15	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan pelaksanaan	kali	16,00	978.533.500	4,00		231.685.013	4,00	92.198.400	4,00	86.975.345	100,00	94,33		8,00	318.660.358	50,00	32,57	BAPPEDA	Sumatera Barat
				laporan						1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat	
				orang						100,00		100,00		100,00		100,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat	
16	3.00.02.3.16	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Dukungan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Komisi Irigasi, Dewan Sumber Daya Air, dan Program Integrated Parcilipatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	laporan		652.975.750			115.497.570	1,00	58.901.600	1,00	58.164.190	100,00	98,75		1,00	173.661.760	#DIV/0!	26,60	BAPPEDA	Sumatera Barat
				orang						100,00		100,00		100,00		100,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat	
				kali						4,00		4,00		100,00		4,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat	
17	3.00.02.3.17	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	rancangan RKPD lingkup bidang pembangunan soaial budaya dan pemerintahan; KUA PPAS lingkup lingkup bidang pembangunan soaial budaya dan pemerintahan; Rapat koordinasi terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup bidang pembangunan soaial budaya; laporan kegiatan	(1.)dokumen		3.219.799.000			564.441.654	3,00	555.482.500	3,00	495.500.556	100,00	89,20		3,00	1.059.942.210	#DIV/0!	32,92	BAPPEDA	Padang
				(2.)kali						6,00		6,00		100,00		6,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Padang	
				(3.)laporan						1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Padang	
				sasaran pembangunan	24,00		6,00			6,00		6,00		100,00		12,00		50,00		BAPPEDA	Padang	
18	3.00.02.3.18	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	-Sasaran pembangunan sub bidang sosial budaya yang tercapai,	sasaran		788.158.900			162.237.198	6,00	110.000.000	6,00	107.365.549	100,00	97,61		6,00	269.602.747	#DIV/0!	34,21	BAPPEDA	Padang
				laporan kegiatan						1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Padang	
19	3.00.02.3.19	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sasaran pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur yang tercapai	dokumen		954.549.000			186.524.395	5,00	102.204.000	5,00	102.107.968	100,00	99,91		5,00	288.632.363	#DIV/0!	30,24	BAPPEDA	Padang
				laporan kegiatan						1,00		1,00		100,00		1,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Padang	
20	3.00.02.3.20	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	sasaran pembangunansub bidang sumberdaya manusia tercapai; pembinaan Kab/Kota sehat	sasaran	24,00	1.471.226.000	6,00		504.798.152	6,00	108.229.100	6,00	103.053.530	100,00	95,22		12,00	607.851.682	50,00	41,32	BAPPEDA	Padang
				orang						150,00		150,00		100,00		150,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Padang	

		Program/Kegiatan			(akhir periode Kenstra Perangkat Daerah)		Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		(Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			Tabel		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
				kab/kota					19,00		19,00		100,00			19,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Padang
21	3.00.02.3.21	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	1.Kab/kota pelaksana SABRT yang terfasilitasi rakor AMPL 2. Laporan kegiatan 3. Kabupaten pelaksana pamsisimas III yang terfasilitasi	Kabupaten	8,00	851.940.000	2,00	204.589.657	12,00	154.511.600	12,00	153.651.982	100,00	99,44		14,00	358.241.639	175,00	42,05	BAPPEDA	Kota Padang,
				kali					2,00		2,00		100,00			2,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang,
				dokumen					1,00		1,00		100,00			1,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang,
22	3.00.02.3.22	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Tersusunya laporan koordinasi	dokumen	3,00	1.449.840.000		0	1,00	159.477.600	1,00	154.836.576	100,00	97,09		1,00	154.836.576	33,33	10,68	BAPPEDA	Kota Padang,
				ekspl					5,00		5,00		100,00			5,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang,
23	3.00.02.3.23	Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pangan & Gizi, Sosialisasi RAD Pangan dan Gizi di 3 Kabupaten/Kota	(2.) Kab/Kota		734.000.000		0	3,00	76.001.000	3,00	72.326.624	100,00	95,17		3,00	72.326.624	#DIV/0!	9,85	BAPPEDA	Kota Padang
				(1.) Kab/Kota					19,00		19,00		100,00			19,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang

		Program/Kegiatan			(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)		(Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%			Tabel		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
24	3.00.02.3.24	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja OPD Provinsi; Rapat koordinasi dan kon solidasi pelaksanaan evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten/kota; Rapat evaluasi rancangan peraturan daerah dokumen perencanaan kab/kota	(1.) kali		1.254.840.000		0	4,00	236.029.500	4,00	235.282.708	100,00	99,68		4,00	235.282.708	#DIV/0!	18,75	BAPPEDA	Kota Padang,
				(3.) kab/kota					5,00		5,00		100,00			5,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang,
				(2.) kali					4,00		4,00		100,00			4,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang,
25	3.00.02.3.25	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat	1. GAP/GBS OPD Provinsi yang diverifikasi 2. Rakor pelaksanaan RAD PUG 3. Pemantauan pelaksanaan RAD PUG kab/kota 4. Verifikasi pelaporan RANDA PUG Kab/Kota	(4.) kali		1.585.624.100		394.561.283	3,00	468.818.000	3,00	394.511.922	100,00	84,15		3,00	789.073.205	#DIV/0!	49,76	BAPPEDA	Kota Padang,
				(1.) OPD					50,00		50,00		100,00			50,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang,
				(2.) kali					4,00		4,00		100,00			4,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang,
				(3.) kab/kota					19,00		19,00		100,00			19,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Kota Padang,
26	3.00.02.3.26	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	- Terlaksananya rapat teknis persiapan Rakortek - Terlaksananya Rakortek Tingkat Provinsi - Terlaksananya Rakortek Tingkat Pusat	%		1.547.210.000		152.857.081	100,00	270.119.615	100,00	267.737.795	100,00	99,12		100,00	420.594.876	#DIV/0!	27,18	BAPPEDA	Sumatera Barat
				orang					40,00		40,00		100,00			40,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat
				dokumen					1,00		1,00		100,00			1,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Sumatera Barat
27	3.00.02.3.27	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah	Meningkatnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/kota	kali		677.940.000		299.464.201	1,00	64.788.100	1,00	64.206.613	100,00	99,10		1,00	363.670.814	#DIV/0!	53,64	BAPPEDA	Provinsi Sumatera Barat
				orang					50,00		50,00		100,00			50,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Provinsi Sumatera Barat
				buah					5,00		5,00		100,00			5,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Provinsi Sumatera Barat
28	3.00.02.3.28	Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat	Pembinaan kab/kota sehat	org		826.500.000		0	150,00	246.730.000	150,00	278.404.590	100,00	112,84		150,00	278.404.590	#DIV/0!	33,68	BAPPEDA	Padang
				kab/kota					19,00		19,00		100,00			19,00		#DIV/0!		BAPPEDA	Padang
29	3.00.02.3.29	Midterm Review RPJMD	Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	Dokumen		465.000.000		0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0	#DIV/0!	0,00	BAPPEDA	Sumatera Barat
30	3.00.02.3.30	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021	Rancangan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	dokumen		0		0	1,00	396.712.000	0,00	39.997.100	0,00	10,08		0,00	39.997.100	#DIV/0!	#DIV/0!	BAPPEDA	Sumatera Barat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		#DIV/0!	#DIV/0!		
Predikat Kinerja																		#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Program(%)													109,83	97,10				110,28	50,76		
Predikat Kinerja Keseluruhan Program													ST	ST				ST	SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																					
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam triwulan berikutnya *)																					
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya *)																					

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

		Program/Kegiatan			(akhir periode Kenstra Perangkat Daerah)	Kenja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (%)	(Kenja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		Tabel	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Lampiran II.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Provinsi Sumatera Barat

OPD : BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN			100%	24.626.000.000	FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN			100%	24.126.000.000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	4.240.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	4.240.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat, tersedianya benda pos / materai, dan terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap	Padang	12 bulan	61.030.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat, tersedianya benda pos / materai, dan terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap	Padang	12 bulan	61.030.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi yang terpenuhi	Padang	12 bulan	1.105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi yang terpenuhi	Padang	12 bulan	1.105.000.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor		Padang	12 bulan	1.310.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor		Padang	12 bulan	1.310.000.000	
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Gedung kantor dan kendaraan dinas jabatan /operasional roda empat yang dijamin/ diasuransikan atau barang milik daerah lainnya	Padang	11 unit	128.060.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Gedung kantor dan kendaraan dinas jabatan /operasional roda empat yang dijamin/ diasuransikan atau barang milik daerah lainnya	Padang	11 unit	128.060.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Padang	12 bulan	99.750.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Padang	12 bulan	99.750.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	Padang	12 bulan	117.900.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	Padang	12 bulan	117.900.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	Padang	12 bulan	68.290.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	Padang	12 bulan	68.290.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Mass Media)	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Padang	6 jenis koran, 1 majalah, dan buku-	70.710.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Mass Media)	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Padang	6 jenis koran, 1 majalah, dan buku-	70.710.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan / rapat yang diselenggarakan	Padang	40 kali	65.870.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan / rapat yang diselenggarakan	Padang	40 kali	65.870.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Padang	95 kali dalam daerah; 81 kali luar daerah	998.340.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Padang	95 kali dalam daerah; 81 kali luar daerah	998.340.000	
Penyediaan Jasa pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Wirid Kantor dan Kegiatan Senam di kantor	Padang	48 kali, 48 kali dan 1 paket	117.900.000	Penyediaan Jasa pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Wirid Kantor dan Kegiatan Senam di kantor	Padang	48 kali, 48 kali dan 1 paket	117.900.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang		97.150.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang		97.150.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.339.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.339.000.000	
	Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau)		Hijau			Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau)		Hijau		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	Pengadaan alat rumah tangga; alat pendingin;	418.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	Pengadaan alat rumah tangga; alat pendingin;	418.000.000	
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer/laptop, printer, UPS dan WPS	Padang	4 unit komputer pc; 3 unit laptop; 5	190.500.000	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer/laptop, printer, UPS dan WPS	Padang	4 unit komputer pc; 3 unit laptop; 5	190.500.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas Jabatan/Operasional roda empat	Padang	1 unit	450.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas Jabatan/Operasional roda empat	Padang	1 unit	450.000.000	
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Padang	12 bulan	339.000.000	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Padang	12 bulan	339.000.000	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional/dinas	Padang	13 unit kendaraan dinas roda 4	195.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional/dinas	Padang	13 unit kendaraan dinas roda 4	195.000.000	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Tabung pemadam kebakaran dan Pompa Air	Padang	35 unit AC; 14 buah; 6 buah	65.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Tabung pemadam kebakaran dan Pompa Air	Padang	35 unit AC; 14 buah; 6 buah	65.000.000	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	pemeliharaan sound system, telepon, fax serta perbaikan jaringan instalasi telepon dan fax	Padang	12 bulan	26.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	pemeliharaan sound system, telepon, fax serta perbaikan jaringan instalasi telepon dan fax	Padang	12 bulan	26.000.000	
Pemeliharaan Rutin/ Komputer dan Jaringan Komputer	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan suku cadang	Padang	33 unit komputer PC; 30 unit laptop; 30 unit printer; 15 unit	96.120.000	Pemeliharaan Rutin/ Komputer dan Jaringan Komputer	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan suku cadang	Padang	33 unit komputer PC; 30 unit laptop; 30 unit printer; 15 unit	96.120.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung kantor yang diperbaiki	Padang	2 unit	559.380.000	Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung kantor yang diperbaiki	Padang	2 unit	559.380.000	
Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur dalam berpakaian dinas			115.000.000	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur dalam berpakaian dinas			115.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas ASN dan PTT	Padang	95 stel	115.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas ASN dan PTT	Padang	95 stel	115.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Bappeda			373.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Bappeda			373.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN mengikuti Bimtek	Padang	25 orang	373.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN mengikuti Bimtek	Padang	25 orang	373.000.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				897.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				897.000.000	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPJ, LAKIP Bappeda)	Padang	3 Dokumen	282.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPJ, LAKIP Bappeda)	Padang	3 Dokumen	282.000.000	
Penatausahaan Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD	Padang	1 orang PA; 5 orang KPA; 1 orang PPK;	396.000.000	Penatausahaan Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD	Padang	1 orang PA; 5 orang KPA; 1 orang PPK;	396.000.000	
Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Pelaksanaan forum OPD, Renja OPD, RKA-DPA OPD dan Dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya	Padang	3 Dokumen	113.000.000	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Pelaksanaan forum OPD, Renja OPD, RKA-DPA OPD dan Dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya	Padang	3 Dokumen	113.000.000	
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan aset daerah	Padang	12 bulan	106.000.000	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan aset daerah	Padang	12 bulan	106.000.000	
Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi		80%	1.032.000.000	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi		80%	1.032.000.000	
	Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD) provinsi dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPd)		95%			Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD) provinsi dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPd)		95%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengelolaan website www.bappeda_sumbar.go.id	Terbangunnya dan terhimpunnya data/informasi yang akurat serta tersebarnya informasi pembangunan kepada stakeholder	Padang	12 bulan	118.000.000	Pengelolaan website www.bappeda_sumbar.go.id	Terbangunnya dan terhimpunnya data/informasi yang akurat serta tersebarnya informasi pembangunan kepada stakeholder	Padang	12 bulan	118.000.000	
Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya forum data perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Padang	1 buku (80 eksemplar); 1 aplikasi	594.000.000	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya forum data perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Padang	1 buku (80 eksemplar); 1 aplikasi	594.000.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan	Terkelolanya data dan informasi geo spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat	Sumatera Barat	5 buku	170.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan	Terkelolanya data dan informasi geo spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat	Sumatera Barat	5 buku	170.000.000	
Pembuatan Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	terlaksananya pembuatan video pembangunan provinsi sumatera barat	Sumatera Barat	200 cd	150.000.000	Pembuatan Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	terlaksananya pembuatan video pembangunan provinsi sumatera barat	Sumatera Barat	200 cd	150.000.000	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi		100%	3.643.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi		100%	3.593.000.000	
Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terselenggaranya Musrenbang Daerah Provinsi Sumatera Barat	Padang	1 dokumen (10 buku prosiding)	931.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terselenggaranya Musrenbang Daerah Provinsi Sumatera Barat	Padang	1 dokumen (10 buku prosiding)	881.000.000	
Penyusunan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD	Padang	2 dokumen (320 eksemplar)	440.000.000	Penyusunan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD	Padang	2 dokumen (320 eksemplar)	440.000.000	
Penyusunan KUA PPAS APBD	Tersedianya dokumen KUA PPAS APBD	Padang	2 dokumen (680 eksemplar)	470.000.000	Penyusunan KUA PPAS APBD	Tersedianya dokumen KUA PPAS APBD	Padang	2 dokumen (680 eksemplar)	470.000.000	
Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Padang	7 modul	361.000.000	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Padang	7 modul	361.000.000	
Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Padang	50 buku	110.000.000	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Padang	50 buku	110.000.000	
Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	Persentase angka kredit Fungsional Perencana	Padang	2 orang	200.000.000	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	Persentase angka kredit Fungsional Perencana	Padang	2 orang	200.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah	Terlaksananya Dokumentasi, Informasi dan Penyebarluasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Padang	4 dokumen (RKPD; EKPD; Kalender Perencanaan RPJMD)	81.000.000	Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah	Terlaksananya Dokumentasi, Informasi dan Penyebarluasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Padang	4 dokumen (RKPD; EKPD; Kalender Perencanaan RPJMD)	81.000.000	
Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Tersedianya bahan penyusunan Dokumen Perencanaan jangka Menengah Tahun 2021-2026	Padang	1 dokumen	700.000.000	Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Tersedianya bahan penyusunan Dokumen Perencanaan jangka Menengah Tahun 2021-2026	Padang	1 dokumen	700.000.000	
Penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD	Tersedianya dokumen KUA PPAS Perubahan	Padang	2 dokumen	0	Penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD	Tersedianya dokumen KUA PPAS Perubahan	Padang	2 dokumen	0	
Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Tersedianya Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Padang	1 dokumen	-	Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Tersedianya Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Padang	1 dokumen		
Penyusunan KUA PPAS Perubahan Perubahan	Tersedianya dokumen KUA PPAS			-	Penyusunan KUA PPAS Perubahan Perubahan	Tersedianya dokumen KUA PPAS			-	
Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	- Persentase realisasi angka kredit Fungsional Perencana dan peran JFP dalam organisasinya , - Terlaksananya Rapat Tim Penilai	Padang	100%, 1 Kali, 4 Kali, 1 Jenis Buku 10	200.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	- Persentase realisasi angka kredit Fungsional Perencana dan peran JFP dalam organisasinya , - Terlaksananya Rapat Tim Penilai	Padang	100%, 1 Kali, 4 Kali, 1 Jenis Buku 10	200.000.000	
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Provinsi Sumatera Barat	terlaksananya survey kepuasan masyarakat	Padang	1 kali	150.000.000	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Provinsi Sumatera Barat	terlaksananya survey kepuasan masyarakat	Padang	1 kali	150.000.000	
Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi		90%	11.987.000.000	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi		90%	11.537.000.000	
Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	Terlaksananya kerjasama ekonomi regional dan internasional	Padang	1 laporan	1.389.000.000	Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	Terlaksananya kerjasama ekonomi regional dan internasional	Padang	1 laporan	1.189.000.000	
Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	Terlaksananya Pelaporan SDGs di Sumatera Barat	Sumatera Barat	1 laporan	174.000.000	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	Terlaksananya Pelaporan SDGs di Sumatera Barat	Sumatera Barat	1 laporan	174.000.000	
Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Sumatera Barat	1 laporan	360.000.000	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Sumatera Barat	1 laporan	360.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah	Meningkatnya Kapasitas Tim Kooordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	1 laporan	141.000.000	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah	Meningkatnya Kapasitas Tim Kooordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	1 laporan	141.000.000	
Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Terlaksananya koordinasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal	Sumatera Barat	1 laporan	224.000.000	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Terlaksananya koordinasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal	Sumatera Barat	1 laporan	224.000.000	
Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Sumatera Barat	1 dokumen	775.000.000	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Sumatera Barat	1 dokumen	725.000.000	
Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	Terlaksananya rakortek pembangunan daerah	Padang	1 laporan	590.000.000	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	Terlaksananya rakortek pembangunan daerah	Padang	1 laporan	540.000.000	
Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	Terlaksananya koordinasi RAD Pangan an Gizi	Sumatera Barat	19 kab/kota	284.000.000	Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	Terlaksananya koordinasi RAD Pangan an Gizi	Sumatera Barat	19 kab/kota	284.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaanprovinsi kab/kota	Padang	- 50 Renja - 19 kab/kota - 13 kab/kota	500.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaanprovinsi kab/kota	Padang	- 50 Renja - 19 kab/kota - 13 kab/kota	500.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Sumatera Barat	20 kali	493.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Sumatera Barat	20 kali	443.000.000	
Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai PP No 39 Tahun 2006	Tersedianya hasil pemantauan dan pelaporan manajerial aplikasi PP 39/2006	Sumatera Barat	4 kali (20 eksemplar)	251.000.000	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai PP No 39 Tahun 2006	Tersedianya hasil pemantauan dan pelaporan manajerial aplikasi PP 39/2006	Sumatera Barat	4 kali (20 eksemplar)	251.000.000	
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan buku evaluasi kinerja Pembangunan Daerah	Padang	1 Buku (100 eksemplar)	275.000.000	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan buku evaluasi kinerja Pembangunan Daerah	Padang	1 Buku (100 eksemplar)	275.000.000	
Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Kab/ kota pelaksana SABRT yang terfasilitasi ; rakor AMPL ; Laporan Kegiatan	Sumatera Barat	2 kali; 12 kabupaten	267.000.000	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Kab/ kota pelaksana SABRT yang terfasilitasi ; rakor AMPL ; Laporan Kegiatan	Sumatera Barat	2 kali; 12 kabupaten	267.000.000	
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	Rancangan RKPD lingkup bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan; KUA PPAS Lingkup Bidang Sosial dan Budaya ; Rapat Koordinasi terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup bidang Sosial dan Budaya	Sumatera Barat	4 dokumen	957.000.000	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	Rancangan RKPD lingkup bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan; KUA PPAS Lingkup Bidang Sosial dan Budaya ; Rapat Koordinasi terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup bidang Sosial dan Budaya	Sumatera Barat	4 dokumen	907.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Perencanaan akselerasi pembangunan pertanian dan perikanan yang sinkron	Sumatera Barat	200 orang	306.000.000	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Perencanaan akselerasi pembangunan pertanian dan perikanan yang sinkron	Sumatera Barat	200 orang	306.000.000	
Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Dukungan perkuatan kelembagaan sumber daya air	Sumatera Barat	- 100 orang 1 laporan (10 eksemplar)	209.000.000	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Dukungan perkuatan kelembagaan sumber daya air	Sumatera Barat	- 100 orang 1 laporan (10 eksemplar)	209.000.000	
Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Perencanaan akselerasi perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha yang sinkron	Sumatera Barat	200 orang	305.000.000	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Perencanaan akselerasi perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha yang sinkron	Sumatera Barat	200 orang	305.000.000	
JUMLAH				24.626.000.000	JUMLAH				24.126.000.000	

Lampiran III.
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Perkiraan Maju tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat

Nama OPD : BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
	BAPPEDA				24.126.000.000				22.626.000.000	
	FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN			100%	24.126.000.000				22.626.000.000	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	4.240.000.000			100%	4.241.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat, tersedianya benda pos / materai, dan terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap	Padang	12 bulan	61.030.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	61.000.000	Sekretariat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi yang terpenuhi	Padang	12 bulan	1.105.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	1.236.000.000	Sekretariat
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor		Padang	12 bulan	1.310.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	1.310.000.000	Sekretariat
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Gedung kantor dan kendaraan dinas jabatan /operasional roda empat yang dijamin/ diasuransikan atau barang milik daerah lainnya	Padang	11 unit	128.060.000	APBD	Lanjutan	12 unit	95.000.000	Sekretariat
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Padang	12 bulan	99.750.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	100.000.000	Sekretariat
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	Padang	12 bulan	117.900.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	118.000.000	Sekretariat
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	Padang	12 bulan	68.290.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	68.000.000	Sekretariat
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Mass Media)	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Padang	6 jenis koran, 1 majalah, dan buku-buku	70.710.000	APBD	Lanjutan	6 jenis koran, 1 majalah, dan buku-buku	71.000.000	Sekretariat
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan / rapat yang diselenggarakan	Padang	40 kali	65.870.000	APBD	Lanjutan	40 kali	66.000.000	Sekretariat
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Padang	95 kali dalam daerah; 81 kali luar daerah	998.340.000	APBD	Lanjutan	95 kali dalam daerah; 81 kali luar daerah	998.000.000	Sekretariat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
	11	Penyediaan Jasa pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Padang	Wirid Kantor dan Kegiatan Senam di kantor	117.900.000	APBD	Lanjutan	48 kali, 48 kali dan 1 paket	118.000.000	Sekretariat
	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	97.150.000	APBD	Lanjutan			
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	2.339.000.000			100%	2.347.000.000	
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Hijau			Hijau		
	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	418.000.000	APBD	Lanjutan	Pengadaan alat rumah tangga; alat pendingin; mobiler; pengadaan alat studi; alat kesehatan olahraga	418.000.000	Sekretariat
	2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Tersedianya komputer/laptop, printer, UPS dan WPS	190.500.000	APBD	Lanjutan	4 unit komputer pc; 3 unit laptop; 5 unit printer	191.000.000	Sekretariat
	3	Pengadaan Kendaraan Dinas	Padang	Tersedianya kendaraan dinas Jabatan/Operasional roda empat	450.000.000	APBD	Lanjutan	1 unit	450.000.000	Sekretariat
	4	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Padang	Gedung kantor yang terpelihara	339.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	339.000.000	Sekretariat
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Padang	Pemeliharaan kendaraan operasional/dinas	195.000.000	APBD	Lanjutan	13 unit kendaraan dinas roda 4	195.000.000	Sekretariat
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Pemeliharaan AC, Tabung pemadam kebakaran dan Pompa Air	65.000.000	APBD	Lanjutan	35 unit AC; 14 buah; 6 buah	65.000.000	Sekretariat
	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	pemeliharaan sound system, telepon, fax serta perbaikan jaringan instalasi telepon dan fax	26.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	26.000.000	Sekretariat
	8	Pemeliharaan Rutin/ Komputer dan Jaringan Komputer	Padang	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan suku cadang	96.120.000	APBD	Lanjutan	33 unit komputer PC; 30 unit laptop; 30 unit printer; 15 unit UPS; 3 unit scan; 1 LS jaringan komputer	96.000.000	Sekretariat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
			9		Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung kantor yang diperbaiki	Padang	2 unit	559.380.000	APBD	Lanjutan	3 unit	567.000.000	Sekretariat
			03		Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur dalam berpakaian dinas			115.000.000				115.000.000	
			1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas ASN dan PTT	Padang	95 stel	115.000.000	APBD	Lanjutan	110 stel	115.000.000	Sekretariat
			04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Bappeda			373.000.000				373.000.000	
			1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN mengikuti Bimtek	Padang	25 orang	373.000.000	APBD	Lanjutan	25 orang	373.000.000	Sekretariat
			05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				897.000.000				897.000.000	Sekretariat
			1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPJ, LAKIP Bappeda)	Padang	3 Dokumen	282.000.000	APBD	Lanjutan	3 Dokumen	282.000.000	Sekretariat
			2		Penatausahaan Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD	Padang	1 orang PA; 5 orang KPA; 1 orang PPK; 14 orang PPTK; 12 orang	396.000.000	APBD	Lanjutan	1 orang PA; 5 orang KPA; 1 orang PPK; 14 orang PPTK; 12 orang	396.000.000	Sekretariat
			3		Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Pelaksanaan forum OPD, Renja OPD, RKA-DPA OPD dan Dokumen perencanaandan penganggaran lainnya	Padang	3 Dokumen	113.000.000	APBD	Lanjutan	3 Dokumen	113.000.000	Sekretariat
			4		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan aset daerah	Padang	12 bulan	106.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	106.000.000	Sekretariat
			06		Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi		80%	1.032.000.000			90%	882.000.000	
						Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD) provinsi dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPDP)		95%				100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pengelolaan website www.bappeda_sumbar.go.id	Padang	12 bulan	118.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	119.000.000	Sekretariat
	2	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Padang	1 buku (80 eksemplar); 1 aplikasi	594.000.000	APBD	Lanjutan	1 buku (80 eksemplar); 1 aplikasi	593.000.000	Bid PED
	3	Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan	Sumatera Barat	5 buku	170.000.000	APBD	Lanjutan	5 buku	170.000.000	Bid.EPW
	4	Pembuatan Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	200 cd	150.000.000	APBD	baru			Bid PED
07		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	3.593.000.000			100%	3.172.000.000	
	1	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	Padang	1 dokumen (10 buku prosiding)	881.000.000	APBD	Lanjutan	1 dokumen (10 buku prosiding)	931.000.000	Bid Makro
	2	Penyusunan RKPD	Padang	2 dokumen (320 eksemplar)	440.000.000	APBD	Lanjutan	2 dokumen (320 eksemplar)	440.000.000	Bid Makro
	3	Penyusunan KUA PPAS APBD	Padang	2 dokumen (680 eksemplar)	470.000.000	APBD	Lanjutan	2 dokumen (680 eksemplar)		Bid Makro
	4	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Padang	7 modul	361.000.000	APBD	Lanjutan	7 modul	361.000.000	Bid Makro
	5	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Padang	50 buku	110.000.000	APBD	Lanjutan	50 buku	110.000.000	Bid Makro
	6	Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	Padang	2 orang	200.000.000	APBD	Lanjutan	4 orang	200.000.000	Sekretariat
	7	Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah	Padang	4 dokumen (RKPD; EKPd; Kalender Perencanaan P3Book)	81.000.000	APBD	Lanjutan	4 dokumen (RKPD; EKPd; Kalender Perencanaan P3Book)	80.000.000	Sekretariat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
			8	Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Tersedianya bahan penyusunan Dokumen Perencanaan jangka Menengah Tahun 2021-2026	Padang	1 dokumen	700.000.000	APBD	baru			Bid Makro
			9	Penyusunan KUA PPAS Perubahan Perubahan	Tersedianya dokumen KUA PPAS			-					
			10	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	- Persentase realisasi angka kredit Fungsional Perencana dan peran JFP dalam organisasinya , - Terlaksananya Rapat Tim Penilai Angka Kredit Perencana, - Terlaksananya Pertemuan Berkala Perencana Sumatera Barat dan PPPI, - Tersedianya Buku di Bidang Perencanaan Pembangunan, - Terlaskananya Keikutsertaan JFP Sumatera Barat dalam event Nasional terkait dengan AK	Padang	100%, 1 Kali, 4 Kali, 1 Jenis Buku 10 Buah 6 Lap, 1 Kali, 100%	200.000.000	APBD	baru	100%, 1 Kali, 4 Kali, 1 Jenis Buku 10 Buah 6 Lap, 1 Kali, 100%	200.000.000	Sekretariat
			11	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Provinsi	terlaksananya survey kepuasan masyarakat	Padang	1 kali	150.000.000	APBD	baru	1 kali	150.000.000	Bid PED
		08		Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi		90%	11.537.000.000			100%	10.599.000.000	
			1	Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	Terlaksananya kerjasama ekonomi regional dan internasional	Padang	1 laporan	1.189.000.000	APBD	Lanjutan			Bid Makro
			2	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	Terlaksananya Pelaporan SDGs di Sumatera Barat	Sumatera Barat	1 laporan	174.000.000	APBD	Lanjutan	1 laporan	174.000.000	Bid Makro
			3	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Sumatera Barat	1 laporan	360.000.000	APBD	Lanjutan	1 laporan	360.000.000	Bid Makro
			4	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah	Meningkatnya Kapasitas Tim Kooordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	1 laporan	141.000.000	APBD	Lanjutan	1 laporan	141.000.000	Bid Makro
			5	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Terlaksananya koordinasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal	Sumatera Barat	1 laporan	224.000.000	APBD	Lanjutan	1 laporan	224.000.000	Bid Makro
			6	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Sumatera Barat	1 dokumen	725.000.000	APBD	Lanjutan	1 dokumen	775.000.000	Bid Makro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
	7	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	Padang	1 laporan	540.000.000	APBD	Lanjutan	1 laporan	590.000.000	Bid Makro
	8	Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	Sumatera Barat	19 kab/kota	284.000.000	APBD	Lanjutan	19 kab/kota	284.000.000	Bid Makro
	9	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Padang	- 50 Renja - 19 kab/kota - 13 kab/kota	500.000.000	APBD	Lanjutan	- 50 Renja - 19 kab/kota - 13 kab/kota	500.000.000	Bid PED
	10	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sumatera Barat	20 kali	443.000.000	APBD	Lanjutan	20 kali	493.000.000	Bid PED
	11	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai PP No 39 Tahun 2006	Sumatera Barat	4 kali (20 eksemplar)	251.000.000	APBD	Lanjutan	4 kali (20 eksemplar)	251.000.000	Bid PED
	12	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Padang	1 Buku (100 eksemplar)	275.000.000	APBD	Lanjutan	1 Buku (100 eksemplar)	275.000.000	Bid PED
	13	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL)	Sumatera Barat	2 kali; 12 kabupaten	267.000.000	APBD	Lanjutan	2 kali; 12 kabupaten	267.000.000	Bid. Sosbud
	14	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	Sumatera Barat	4 dokumen	907.000.000	APBD	Lanjutan	4 dokumen	957.000.000	Bid. Sosbud
	15	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat	Sumatera Barat	1 dokumen GAP/GBS; 3 kali rakor; 3 kali pemantauan	411.000.000	APBD	Lanjutan	1 dokumen GAP/GBS; 3 kali rakor; 3 kali pemantauan	411.000.000	Bid. Sosbud
	16	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Sumatera Barat	6 sasaran pembangunan	333.000.000	APBD	Lanjutan	6 sasaran pembangunan	333.000.000	Bid. Sosbud
	17	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	Sumatera Barat	6 sasaran pembangunan	239.000.000	APBD	Lanjutan	6 sasaran pembangunan	240.000.000	Bid. Sosbud
	18	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sumatera Barat	5 sasaran pembangunan	273.000.000	APBD	Lanjutan	5 sasaran pembangunan	273.000.000	Bid. Sosbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
	19	Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat	Sumatera Barat	19 kab/kota	312.000.000	APBD	Lanjutan	19 kab/kota	312.000.000	Bid. Sosbud
	20	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Sumatera Barat	1 dokumen (10 eksemplar)	422.000.000	APBD	Lanjutan	1 dokumen (10 eksemplar)	422.000.000	Bid.EPW
	21	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Sumatera Barat	1 laporan (5 eksemplar)	228.000.000	APBD	Lanjutan	1 laporan (5 eksemplar)	228.000.000	Bid.EPW
	22	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	Sumatera Barat	5 dokumen (Renja; RKPD; KUA-PPAS; RKPD Perubahan; KUA-PPAS Perubahan)	498.000.000	APBD	Lanjutan	5 dokumen (Renja; RKPD; KUA-PPAS; RKPD Perubahan; KUA-PPAS Perubahan)	548.000.000	Bid.EPW
	23	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumatera Barat	1 dokumen (10 buku)	537.000.000	APBD	Lanjutan	1 dokumen (10 buku)	537.000.000	Bid.EPW
	24	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Sumatera Barat	- 60 orang - 120 orang	900.000.000	APBD	Lanjutan	- 60 orang - 120 orang	900.000.000	Bid.EPW
	25	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Sumatera Barat	1 dokumen (10 eksemplar)	284.000.000	APBD	Lanjutan	1 dokumen (10 eksemplar)	284.000.000	Bid.EPW
	26	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Sumatera Barat	200 orang	306.000.000	APBD	Lanjutan	200 orang	306.000.000	Bid.EPW
	27	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Sumatera Barat	- 100 orang 1 laporan (10 eksemplar)	209.000.000	APBD	Lanjutan	- 100 orang 1 laporan (10 eksemplar)	209.000.000	Bid.EPW
	28	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Sumatera Barat	200 orang	305.000.000	APBD	Lanjutan	200 orang	305.000.000	Bid.EPW
		JUMLAH			24.126.000.000				22.626.000.000	

Lampiran IV
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Perkiraan Maju tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat

Nama OPD : : BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				34.316.600.516					
5	01				PERENCANAAN				34.316.600.516				39.464.090.593	
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah		95%	19.310.310.516			96%	22.206.857.093	
5	01	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85%	1.115.000.000			90%	1.282.250.000	
				01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Bappeda yang disusun	Sumatera Barat	2 Dokumen	115.000.000	APBD		2 Dokumen	132.250.000	
				02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	Sumatera Barat	9 Dokumen	75.000.000	APBD		9 Dokumen	86.250.000	
				03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan)	Sumatera Barat	4 Dokumen	150.000.000	APBD		4 Dokumen	172.500.000	
				04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (Forum Perangkat Daerah, Forum Kepala Bappeda)	Sumatera Barat	5 Kali	500.000.000	APBD		5 Kali	575.000.000	
				05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja triwulanan	Sumatera Barat	4 Dokumen	275.000.000	APBD		4 Dokumen	316.250.000	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan	Tertib administrasi keuangan		12 Bulan	10.740.600.516			12 Bulan	12.351.690.593	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda yang dibayarkan dalam 1 tahun	Padang	100 orang	10.190.600.516	APBD		100 orang	11.719.190.593	
				07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	- Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran - Laporan Aset Semesteran	Padang	- 13 laporan - 2 laporan	275.000.000	APBD		- 13 laporan - 2 laporan	316.250.000	
				09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Laporan Keuangan Akhir Tahun - Laporan Aset Akhir Tahun	Padang	- 1 laporan - 1 laporan	275.000.000	APBD		- 1 laporan - 1 laporan	316.250.000	
5	01	01	1.03		Administrasi Umum	Tertib administrasi umum		12 bulan	6.584.710.000			12 bulan	7.572.416.500	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Padang	10 kali	10.000.000	APBD		10 kali	11.500.000	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening tagihan yang di bayarkan - listrik - air - telpon - internet	Padang	- 245.000 kwh - 600 meter kubik - 8 rekening telpon - 80 mbps	1.105.000.000	APBD		- 245.000 kwh - 600 meter kubik - 8 rekening telpon - 80 mbps	1.270.750.000	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan) - Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan) - Jasa Rohaniwan - Dukungan penerapan new normal	Padang	12 bulan	150.000.000	APBD	plus covid19	12 bulan	172.500.000	
				05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jasa Jaminan Barang Milik Daerah : - gedung - kendaraan dinas operasional	Padang	- 1 unit - 11 unit	130.000.000	APBD		- 1 unit - 11 unit	149.500.000	
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	11 unit	17.000.000	APBD		11 unit	19.550.000	
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, petugas PPHPK)	Padang	12 bulan	430.000.000	APBD		12 bulan	494.500.000	
				08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jasa Kebersihan Kantor - Jasa Pengamanan Kantor - Jasa sopir Kantor - Honor PTT	Padang	12 bulan	1.200.000.000	APBD		12 bulan	1.380.000.000	
				09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	Padang	12 bulan	-	APBD		12 bulan	-	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	Padang	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	57.500.000	
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Padang	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	57.500.000	
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Padang	12 bulan	220.000.000	APBD	plus kubikel	12 bulan	253.000.000	
				13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Padang	12 bulan	35.000.000	APBD		12 bulan	40.250.000	
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Padang	3 Jenis	60.000.000	APBD		3 Jenis	69.000.000	
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman yang di sediakan untuk pertemuan dan tamu	Padang	12 bulan	65.870.000	APBD		12 bulan	75.750.500	
				18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Padang	12 bulan	998.340.000	APBD		12 bulan	1.148.091.000	
				23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang di adakan	Padang	5 jenis	580.000.000	APBD		5 jenis	667.000.000	
				25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang di adakan	Padang	1 Unit	1.058.500.000	APBD		1 Unit	1.217.275.000	
				27	Pengadaan Meubeler	Meubeler yang diadakan	Padang	3 jenis	50.000.000	APBD		3 jenis	57.500.000	
				29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang di pelihara	Padang	1 unit	150.000.000	APBD		1 unit	172.500.000	
				31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	Padang	11 Unit	100.000.000	APBD		11 Unit	115.000.000	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Padang	12 bulan	75.000.000	APBD		12 bulan	86.250.000	
				35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang di pelihara	Padang	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	57.500.000	
5	01	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur		60%	870.000.000			65%	1.000.500.000	
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	Padang	100 stel	85.000.000	APBD		100 stel	97.750.000	
				03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan	Padang	100 stel	50.000.000	APBD		100 stel	57.500.000	
				04	Pengadaan Pakaian Korpri	Pakaian Korpri yang disediakan	Padang	100 stel	-	APBD		100 stel	-	
				05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang disediakan	Padang	100 stel	85.000.000	APBD		100 stel	97.750.000	
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang di laksanakan dan yang di ikuti	Padang	4 Kali	400.000.000	APBD		4 Kali	460.000.000	
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Bappeda yang mengikuti Bimtek	Padang	20 orang	250.000.000	APBD		20 orang	287.500.000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPd provinsi		80%	5.211.290.000			85%	5.992.983.500	
5	01	02	1.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen	3.911.290.000			3 dokumen	4.497.983.500	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPd) Provinsi	1. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2024	Sumatera Barat	1 dokumen	750.000.000	APBD		1 dokumen	862.500.000	
						2. Dokumen RKPd Tahun 2022 dan RKPd Perubahan Tahun 2021	Sumatera Barat	2 dokumen				2 dokumen		
				02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota	1. Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kab/Kota yang dievaluasi.	Sumatera Barat	13 kab/kota	500.000.000	APBD		13 kab/kota	575.000.000	
						2. Dokumen Rancangan Akhir RKPd Kab/Kota yang difasilitasi.	Sumatera Barat	19 kab/kota				19 kab/kota		
						3. Dokumen Rancangan Perubahan RKPd Kab/Kota yang difasilitasi.	Sumatera Barat	19 kab/kota				19 kab/kota		
				03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1. Musrenbang RPJMD Provinsi tahun 2021-2024 yang dilaksanakan	Sumatera Barat	1 kali	430.000.000	APBD		1 kali	494.500.000	
						2. Musrenbang RKPd Provinsi Tahun 2022 yang dilaksanakan	Sumatera Barat	1 kali				1 kali		
				04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah yang di koordinir	Sumatera Barat	51 Perangkat Daerah	225.000.000	APBD		51 Perangkat Daerah	258.750.000	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	1. Dokumen Rencana Pembangunan lainnya yang di integrasikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan daerah (dokumen) * dokumen lainnya : diluar dok rencana pemb prov (RPJP,RPJMD, RKPD)	Sumatera Barat	1 Dokumen	771.290.000	APBD		1 Dokumen	886.983.500	
						2. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang di ikuti	Sumatera Barat	1 Kali				1 Kali		
						3. Rapat Pra Musrenbang Nasional yang diikuti	Sumatera Barat	1 kali				1 kali		
						4. Rapat Musrenbang Nasional yang diikuti	Sumatera Barat	1 kali				1 kali		
						5. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan yang dilaksanakan	Sumatera Barat	19 kab/kota				19 kab/kota		
				06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	1. Dokumen Identifikasi Permasalahan RPJMD	Sumatera Barat	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	287.500.000	
						2. Dokumen Identifikasi Permasalahan RKPD	Sumatera Barat	1 dokumen				1 dokumen		
				07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Website - Sakato Plan (E-database,Simonev, e-planning), apps	Sumatera Barat	- 120 berita - 2 aplikasi	300.000.000	APBD		- 120 berita - 2 aplikasi	345.000.000	
				08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Data dan Informasi yang di amankan	Sumatera Barat	12 Bulan	185.000.000	APBD		12 Bulan	212.750.000	
				09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan informasi yang disediakan - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat - Data Spasial dan Numerik	Sumatera Barat	- 1 vidio - 2 dokumen	500.000.000	APBD		- 1 vidio - 2 dokumen	575.000.000	
5	01	02	1.02		Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pendanaan pembangunan daerah		1 dokumen	350.000.000			1 dokumen	402.500.000	
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran Daerah yang dilaksanakan	Sumatera Barat	4 kali	200.000.000	APBD		4 kali	230.000.000	
				03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Rancangan gambaran Umum Ekonomi dan Keuangan Daerah (RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	172.500.000	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan		75%	950.000.000			75%	1.092.500.000	
				01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Monitoring pelaksanaan dokumen rencana Perangkat Daerah yang dilaksanakan (APBD, APBN, DAK, Dekon/TP dan sumber pendanaan lainnya)	Sumatera Barat	30 kali	250.000.000	APBD		30 kali	287.500.000	
				02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Dokumen evaluasi capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Sumatera Barat	1 dokumen	250.000.000	APBD		1 dokumen	287.500.000	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Evaluasi pelaksanaan dokumen rencana Perangkat Daerah yang dilaksanakan (APBD, APBN, DAK, Dekon/TP dan sumber pendanaan	Sumatera Barat	4 kali	300.000.000	APBD		4 kali	345.000.000	
				04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Dokumen capaian Pembangunan Daerah yang disusun (APBD, APBN, DAK, Dekon/TP dan sumber pendanaan lainnya)	Sumatera Barat	4 dokumen	150.000.000	APBD		4 dokumen	172.500.000	
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi		80%	3.435.000.000			80%	3.950.250.000	
5	01	03	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan		8 dokumen	1.075.000.000			8 dokumen	1.236.250.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJMD dan RKPD) 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Pemerintahan	Sumatera Barat	- 2 dokumen - 1 laporan	400.000.000	APBD		- 2 dokumen - 1 laporan	460.000.000	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 11 PD - 11 PD - 11 PD - 11 PD	300.000.000	APBD		- 11 PD - 11 PD - 11 PD - 11 PD	345.000.000	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan	Sumatera Barat	1 laporan	375.000.000	APBD		1 laporan	431.250.000	
5	01	03			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pembangunan Manusia		10 dokumen	1.300.000.000			10 dokumen	1.495.000.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 laporan	500.000.000	APBD		- 1 dokumen - 1 laporan	575.000.000	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi pelaporan Randa PUG - Verifikasi GAP GBS - Verifikasi usulan DAK Kab/Kota tahun 2022	Sumatera Barat	- 10 PD - 10 PD - 10 PD - 10 PD - 76 kali - 51 PD - 19 kab/Kota	500.000.000	APBD		- 10 PD - 10 PD - 10 PD - 10 PD - 76 kali - 51 PD - 19 kab/Kota	575.000.000	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	345.000.000	
5	01	03	1.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat		7 dokumen	1.060.000.000			7 dokumen	1.219.000.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 laporan	500.000.000	APBD		- 1 dokumen - 1 laporan	575.000.000	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 11 PD - 11 PD - 11 PD - 11 PD	260.000.000	APBD		- 11 PD - 11 PD - 11 PD - 11 PD	299.000.000	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Sumatera Barat	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	345.000.000	
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD		80%	3.180.000.000			80%	3.657.000.000	
5	01	04	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian		7 dokumen	1.060.000.000			7 dokumen	1.219.000.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 laporan	500.000.000	APBD		- 1 dokumen - 1 laporan	575.000.000	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 5 PD - 5 PD - 5 PD - 5 PD	260.000.000	APBD		- 5 PD - 5 PD - 5 PD - 5 PD	299.000.000	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	345.000.000	
5	01	04	1.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		8 dokumen	1.060.000.000			8 dokumen	1.219.000.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Ekonomi Kreatif	Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 laporan	500.000.000	APBD		- 1 dokumen - 1 laporan	575.000.000	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 2 PD - 2 PD - 2 PD - 2 PD - 19 Kab/Kota	260.000.000	APBD		- 2 PD - 2 PD - 2 PD - 2 PD - 19 Kab/Kota	299.000.000	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Sumatera Barat	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	345.000.000	
5	01	04	1.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		8 dokumen	1.060.000.000			8 dokumen	1.219.000.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Alam	Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 laporan	500.000.000	APBD		- 1 dokumen - 1 laporan	575.000.000	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 6 PD - 6 PD - 6 PD - 6 PD - 19 Kab/Kota	260.000.000	APBD		- 6 PD - 6 PD - 6 PD - 6 PD - 19 Kab/Kota	299.000.000	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Sumatera Barat	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	345.000.000	
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD		80%	3.180.000.000			80%	3.657.000.000	
5	01	05	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		8 dokumen	1.060.000.000			8 dokumen	1.219.000.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 laporan	500.000.000	APBD		- 1 dokumen - 1 laporan	575.000.000	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 3 PD - 3 PD - 3 PD - 3 PD - 19 Kab/Kota	260.000.000	APBD		- 3 PD - 3 PD - 3 PD - 3 PD - 19 Kab/Kota	299.000.000	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Sumatera Barat	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	345.000.000	
5	01	05	1.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		8 dokumen	1.060.000.000			8 dokumen	1.219.000.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 laporan	500.000.000	APBD		- 1 dokumen - 1 laporan	575.000.000	

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 2 PD - 2 PD - 2 PD - 2 PD - 19 Kab/Kota	260.000.000	APBD		- 2 PD - 2 PD - 2 PD - 2 PD - 19 Kab/Kota	299.000.000	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Sumatera Barat	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	345.000.000	
5	01	05	1.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		8 Dokumen	1.060.000.000			8 Dokumen	1.219.000.000	
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 laporan	500.000.000	APBD		- 1 dokumen - 1 laporan	575.000.000	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	- Verifikasi rancangan renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan akhir renja tahun 2022 - Verifikasi rancangan renstra tahun 2021-2024 - Verifikasi rancangan akhir renstra tahun 2021-2024	Sumatera Barat	- 1 PD - 1 PD - 1 PD - 1 PD - 19 Kab/Kota	260.000.000	APBD		- 1 PD - 1 PD - 1 PD - 1 PD - 19 Kab/Kota	299.000.000	
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Sumatera Barat	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	345.000.000	
					JUMLAH				34.316.600.516				39.464.090.593	

L A M P I R A N

HASIL MAPPING

SESUAI PERMENDAGR NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Lampiran 2

Hasil Pemetaan Sesuai Atau Dapat Dilakukan Mapping

Provinsi Sumatera Barat

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1.	PERENCANAAN	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	Pengelolaan Data Dan Informasi Spasial Berbasis GIS Untuk Perencanaan Pembangunan	Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlasananya Rakor data Spasial	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi [2] Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlasananya Rakor data Spasial ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlasananya Rakor data Spasial ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	
2.	PERENCANAAN	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Tersedianya Sistim Database Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi [2] Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlasananya Rakor data Spasial ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlasananya Rakor data Spasial ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	
3.	PERENCANAAN	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	Pengelolaan Website Www.bappeda.sumbarprov.go.id	Updating berita pada website.bappeda.sumbarprov.go.id	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi [2] Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Sakato Plan (E-Database, Simonev, e-planning), SIPD ▣ Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Website	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	▣ Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Sakato Plan (E-Database, Simonev, e-planning), SIPD ▣ Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Website	
4.	PERENCANAAN	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	Pembuatan Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	terlaksananya pembuatan video pembangunan provinsi sumatera barat	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapai pada RPJMD Provinsi [2] Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlasananya Rakor data Spasial ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlasananya Rakor data Spasial ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
5.	PERENCANAAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RKPDP	Tersusunnya buku RKPDP 2002 dan RKPDP perubahan 2021	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPDP Provinsi [2] Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPDP kabupaten/kota dengan RKPDP Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Dokumen RKPDP Tahun 2022 dan RKPDP Perubahan Tahun 2021 ▣ Dokumen RPJMD Tahun 2021-2024	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Provinsi	▣ Dokumen RKPDP Tahun 2022 dan RKPDP Perubahan Tahun 2021 ▣ Dokumen RPJMD Tahun 2021-2024	
6.	PERENCANAAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah Dan Swasta	Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Book)	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPDP Provinsi [2] Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPDP kabupaten/kota dengan RKPDP Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	▣ Rancangan Gambaran Umum Ekonomi dan Keuangan Daerah (RPJMD dan RKPDP)	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	▣ Rancangan Gambaran Umum Ekonomi dan Keuangan Daerah (RPJMD dan RKPDP)	
7.	PERENCANAAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Musrenbang RKPDP Tahun 2020	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPDP Provinsi [2] Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPDP kabupaten/kota dengan RKPDP Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Musrenbang RPJMD Provinsi tahun 2021-2024 yang dilaksanakan ▣ Musrenbang RKPDP Provinsi Tahun 2022 yang dilaksanakan	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	▣ Musrenbang RPJMD Provinsi tahun 2021-2024 yang dilaksanakan ▣ Musrenbang RKPDP Provinsi Tahun 2022 yang dilaksanakan	
8.	PERENCANAAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPDP Provinsi [2] Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPDP kabupaten/kota dengan RKPDP Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Sakato Plan (E-Database, Simonev, e-planning), SIPD ▣ Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Website	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	▣ Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Sakato Plan (E-Database, Simonev, e-planning), SIPD ▣ Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola : - Website	
9.	PERENCANAAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah	Terlaksananya Dokumentasi, Informasi dan Penyebarluasan Dokumen Perencanaan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPDP Provinsi [2] Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPDP kabupaten/kota dengan RKPDP Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlaksananya Rakor data Spasial ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	▣ Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat, Terlaksananya Rakor data Spasial ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan informasi yang disediakan : - Data Spasial dan Numerik ▣ Data dan Informasi yang disediakan : - Video Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
10.	PERENCANAAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Tersusunnya RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi [2] Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPD kabupaten/kota dengan RKPD Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	▫ Dokumen RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2021 ▫ Dokumen RPJMD Tahun 2021-2024	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	▫ Dokumen RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2021 ▫ Dokumen RPJMD Tahun 2021-2024	
11.	PERENCANAAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Provinsi Sumatera Barat	terlaksananya survey kepuasan masyarakat	URUSAN RUTIN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	[1] Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi [2] Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPD kabupaten/kota dengan RKPD Provinsi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	▫ dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	▫ dokumen evaluasi kinerja triwulanan	
12.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan yang sinkron	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	[1] Persentase kesesuaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	▫ Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam ▫ Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	▫ Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam ▫ Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Alam	
13.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	Dokumen Perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi yang harmonis	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	▫ Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Perekonomian ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	▫ Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Perekonomian ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian	
14.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Dokumen Perencanaan AKselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Ekonomi Kreatif ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Ekonomi Kreatif	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Ekonomi Kreatif ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Ekonomi Kreatif	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
15.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup	Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Sinkron	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
16.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Sosialisasi adaptasi perubahan iklim	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
17.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah	Dokumen Perencanaan pembangunan infrastruktur dan wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron tersusunnya Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	
18.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah	Dokumen Perencanaan pembangunan infrastruktur dan wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron tersusunnya Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
19.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayahan	Dokumen Perencanaan pembangunan infrastruktur dan wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron tersusunnya Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan	= 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan	= 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan	
20.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan pelaksanaan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan	= 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan	= 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayahahan	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
21.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	Terleksananya Koordinasi perencanaan dam implementasi program IPDMIP	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
22.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Dukunga Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Komisi irigasi, Dewan Sumber Daya Air, TKPSDA, dll) dan Program Integrated Parcitipatory Development and Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
23.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	= 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	= 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat = 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
24.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Tersusunnya Laporan Koordinasi	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	= 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti = 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti = 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti = 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Daerah dengan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	= 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti = 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
25.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kerjasama Ekonomi Regional Dan Internasional	1. Laporan Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional, 2. Mengikuti Rakorgub Se-Sumatera, 3. Mengikuti Rapat Teknis Rakorgub se Wilayah Sumatera, 4. Mengikuti Kegiatan IMT-GT, 4. Mengikuti kegiatan Kerjasama dengasn Luar Negeri	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	▫ Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Perekonomian ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	▫ Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Perekonomian ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang Perekonomian	
26.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah	Meningkannya Kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
27.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tersedianya Buku Laporan Pelaksana	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	
28.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pangan dan gizi, sosialisasi RAD Pangan dan Gizi di Sumatera Barat	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
29.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dokumen perencanaan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1. Monitoring terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Laporan Monitoring, 3. Monitoring pelaksanaan Dekon TP, 4. Laporan Monitoring Dekon TP 1. Monitoring terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Laporan Monitoring, 3. Monitoring pelaksanaan Dekon TP, 4. Laporan Monitoring Dekon TP	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1. Monitoring terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Laporan Monitoring, 3. Monitoring pelaksanaan Dekon TP, 4. Laporan Monitoring Dekon TP 1. Monitoring terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Laporan Monitoring, 3. Monitoring pelaksanaan Dekon TP, 4. Laporan Monitoring Dekon TP	
30.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dokumen perencanaan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1. Rapat Evaluasi Capaian Program./Kegiatan terkait SPM, 2. Dokumen hasil Evaluasi Capaian Program./Kegiatan terkait SPM	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	1. Rapat Evaluasi Capaian Program./Kegiatan terkait SPM, 2. Dokumen hasil Evaluasi Capaian Program./Kegiatan terkait SPM	
31.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dokumen perencanaan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah	
32.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dokumen perencanaan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
33.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	1. Kab/kota pelaksana SABRT yang terfasilitasi Rakor AMPL, 2. laporan kegiatan, 3. Kabupaten pelaksana pamsismas III yang terfasilitasi	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	□ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan □ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan □ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan □ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	□ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan □ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan □ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	
34.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Sasaran pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur yang tercapai	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	□ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	□ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pemerintahan	
35.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006	Jumlah laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	□ 1. Monitoring terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Laporan Monitoring, 3. Monitoring pelaksanaan Dekon TP, 4. Laporan Monitoring Dekon TP □ 1. Monitoring terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Laporan Monitoring, 3. Monitoring pelaksanaan Dekon TP, 4. Laporan Monitoring Dekon TP	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	□ 1. Monitoring terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Laporan Monitoring, 3. Monitoring pelaksanaan Dekon TP, 4. Laporan Monitoring Dekon TP □ 1. Monitoring terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Laporan Monitoring, 3. Monitoring pelaksanaan Dekon TP, 4. Laporan Monitoring Dekon TP	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
36.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006	Jumlah laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah	
37.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006	Jumlah laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah	
38.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2020	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah 1. Jumlah rapat evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan, 2. Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan Dekon/TP, 3. Jumlah rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah	

[illegible]

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
42.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan	Rancangan RKPD lingkup bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan, Hasil verifikasi Rancangan Renja dan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2021 serta Rancangan Renja perubahan SKPD,Rapat koordinasi terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup bidang sosial dan budaya, Laporan kegiatan	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
43.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Sasaran pembangunan Sub bidang sumberdaya manusia yang tercapai	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
44.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat	Dokumen PUG di Sumatera Bafrat	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia	
45.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat Di Sumatera Barat	Terlaksananya pelaksanaan kab/kota sehat di Sumatera Barat, Verifikasi dokumen untuk penilaian kab/kota sehat, Pembinaan kab/kota sehat	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia ▫ 1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 2. Laporan Dukungan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pusat Bidang Pembangunan Manusia	

No	Nomenkelatur Dokumen Perencanaan Yang Masih Berlaku				Mapping Permendagri 90 Tahun 2019							
	Urusan	Program	Kegiatan	Output	Bidang Urusan	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
46.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	- Terlaksananya Rapat Teknis Persiapan Rakortek, - Terlaksananya Rakortek tingkat Provinsi, - Mengikuti Rakortek Tingkat Pusat	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti ± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti ± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti ± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti	
47.	PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	Terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[1] Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti ± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti ± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti ± 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2. Jumlah rakortek yang diikuti	

Sub Kegiatan Permendagri 90 Yang Diambil Untuk Kegiatan Baru Perencanaan 2021
Provinsi Sumatera Barat

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sub Kegiatan Permendagri 90 Yang Diambil		
	Sub Kegiatan 90 diambil	Output Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum perangkat daerah yang dikoordinir	1.000.000
2	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah tahunan yang disepakati	1.000.000
3	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Data informasi yang diamankan	1.000.000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Penganggaran	1.000.000
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Berita Acara Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.000.000
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Berita Acara Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.000.000
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan	1.000.000
8	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	1.000.000
9	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Berita Acara Verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1.000.000
10	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1.000.000
11	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Berita Acara Verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian	1.000.000
12	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Perekonomian	1.000.000

No	Sub Kegiatan Permendagri 90 Yang Diambil		
	Sub Kegiatan 90 diambil	Output Sub Kegiatan	Anggaran
13	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Berita Acara Verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Ekonomi Kreatif	1.000.000
14	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	1.000.000
15	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Berita Acara Verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Sumber daya Alam	1.000.000
16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1.000.000
17	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Berita Acara Verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1.000.000
18	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1.000.000
19	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Berita Acara Verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	1.000.000
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	1.000.000
21	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Berita Acara Verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	1.000.000
22	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	1.000.000
	Total Anggaran		22.000.000